

**LAPORAN AKHIR
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG**



**PERAN DESA MENUJU *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*
(STUDI PADA DESA-DESA DI KABUPATEN LAMPUNG TIMUR)**

SITI KHOIRIAH, S.H.I., M.H.

6172031

DR. CANDRA PERBAWATI, S.H., M.H

6679727

**PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
2022**

DAFTAR ISI

| | | |
|--------------------------|---|----|
| Halaman Pengesahan | | |
| Ringkasan | | 1 |
| Bab I | Latar Belakang Masalah | 2 |
| Bab II | Kajian Pustaka | 5 |
| Bab III | Metodologi | 9 |
| Bab IV | Hasil Penelitian | |
| | a. Konsep SDGs Desa | 13 |
| | b. Tujuan Pembangunan Desa | 16 |
| | c. Tingkat Keberhasilan SDGs Desa Secara Nasional | 32 |
| | d. Capaian SDGs di Desa-Desa di Lampung Timur | 32 |
| Bab V | Jadwal Penelitian | 39 |
| Bab VI | Kesimpulan | 40 |
| Daftar Pustaka | | 41 |
| Bukti Submit Paper (LoA) | | |
| Paper | | |

HALAMAN PENGESAHAN
PENELITIAN TERAPAN
UNIVERSITAS LAMPUNG

| | |
|--------------------------------|---|
| Judul penelitian | : Peran Desa Menuju <i>Sustainable Development Goals</i> (Studi Pada Desa-Desa Di Kabupaten Lampung Timur) |
| Manfaat sosial ekonomi | : Pelaksanaan SDGs desa dan strategi apa saja yang telah dilaksanakan oleh desa-desa, program/kegiatan apa saja yang mereka sedang dilaksanakan dan perencanaan untuk tahun-tahun kedepan menuju pencapaian SDGs. |
| Jenis penelitian | : Penelitian Terapan |
| Ketua Peneliti | |
| a. Nama lengkap | : Siti Khoiriah, S.H.I., M.H. |
| b. NIDN | : 0013068202 |
| c. Sinta ID | : 6172031 |
| d. Jabatan Fungsional | : Lektor |
| e. Program Studi | : Ilmu Hukum |
| f. No HP | : 081310325837 |
| g. Alamat surel (email) | : Siti.khoiriah@fh.unila.ac.id |
| Anggota 1 | : |
| Nama Lengkap | : Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H |
| Unit Kerja | : Fakultas Hukum |
| Sinta ID | : 6679727 |
| Jumlah mahasiswa yang terlibat | : 2 Mahasiswa 1. Zeny Nurmayani 2. Luzman Qashmal |
| Lokasi kegiatan | : - |
| Lama kegiatan | : 6 bulan |
| Biaya penelitian | : Rp. 40.000.000 |
| Sumber dana | : BLU Universitas Lampung |

Bandar Lampung, 25 September 2022

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum



Dr. M. Fakhri, S.H., M.S.
NIP. 196412181988031002

Ketua Peneliti

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Siti Khoiriah".

Siti Khoiriah, S.H.I., M.H.
NIP. 198206132015042002

Menyetujui,
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian
Universitas Lampung



Prof. Dr. Ir. H. H. Ariani, D.E.A.
NIP. 196501011993032008

RINGKASAN

Desa sebagai ruang teritorial terkecil dalam struktur pemerintahan di Indonesia, jumlah desa di Indonesia sebanyak 74.961 memiliki potensi dan masalah yang sangat variatif, dapat dilihat dari tingginya angka kemiskinan, rendahnya pendidikan serta minimnya fasilitas kesehatan di desa, hal ini akan sangat berpengaruh besar pada pencapaian SDGs di Indonesia. Undang-undang desa memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa. Maka pelaksanaan SDGs di level desa, dinilai berpotensi dan akan berkontribusi sebesar dalam mensukseskan pencapaian tujuan SDGs. Penelitian ini menggunakan metode normatif empiris, dimana peneliti dengan berbasiskan pada regulasi tentang desa, SDGs, dan regulasi lain yang berkaitan erat serta identifikasi strategi desa dalam perencanaan, pelaksanaan dan monitoring/evaluasi pembangunan menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs). Mitra pada penelitian ini adalah Tenaga Profesional Pendamping Desa dan pemerintah desa di Kabupaten Lampung Timur. Mitra akan sangat berkontribusi dalam memberikan informasi/data-data yang valid dan melakukan pendampingan dalam proses pembangunan di desa dan hasil dari pemetaan akan mengarah pada kebijakan yang akan diambil oleh desa ditahun-tahun berikutnya serta strategi yang bisa dilaksanakan oleh desa-desa demi pencapaian tujuan SDGs *Sustainable Development Goals* (SDGs) yang direalisasikan dalam dokumen/aksi sesuai dengan indikator TKT pada penelitian ini yakni rancangan peraturan, penyusunan roadmap, dokumen jaringan stakeholder/masterplan, pemetaan dan pengkajian kebutuhan teknologi. Hasil penelitian ini akan dipublikasikan pada jurnal internasional terindeks scopus/*web of science*.

Kata kunci: Peran Desa, Kewenangan Desa, Pembangunan Desa, *Sustainable Development Goals* (SDGs).

BAB I

LATAR BELAKANG MASALAH

Upaya pencapaian target TPB/SDGs menjadi prioritas pembangunan nasional yang memerlukan sinergi kebijakan perencanaan di tingkat nasional dan daerah provinsi dan kabupaten/kota. Target-target TPB/SDGs di tingkat nasional telah sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) 2015-2019 dalam bentuk program, kegiatan dan indikator yang terukur dan indikasi dukungan pembiayaan. TPB/SDGs merupakan penyempurnaan dari Tujuan Pembangunan Milenium (*Millenium Development Goals/DDGs*) yang lebih komprehensif dengan melibatkan lebih banyak negara baik negara maju maupun berkembang memperluas pendanaan pada hak asasi manusia, inklusif dengan pelibatan Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan media, filantropi dan pelaku usaha, serta akademisi dan pakar.¹

Daerah memiliki kontribusi yang besar dalam mendukung pencapaian pembangunan berkelanjutan dalam hal pengentasan kemiskinan. Keberadaan daerah secara tidak langsung menjadi titik sentral pelaksanaan pembangunan dan pengelolaan kearifan lokal. Meskipun tidak memiliki otoritas yang cukup besar dalam melakukan hubungan internasional, akan tetapi akses pemerintah daerah langsung berhubungan dengan masyarakat daerah. Keberhasilan pemerintah daerah dalam melaksanakan pembangunan akan berkontribusi secara langsung pada peningkatan kesejahteraan masyarakat secara nasional. Oleh karena itu pemerintah daerah perlu memiliki strategi yang efektif dalam mengatasi perangkap kemiskinan warganya.²

Otonomi daerah di Indonesia sejak munculnya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah telah membuka ruang bagi pemerintah daerah untuk bertanggung jawab dalam mengurus urusan rumah tangganya sendiri. Ini

¹ [Sekilas SDGs | \(bappenas.go.id\)](http://bappenas.go.id), diakses pada 2 Maret 2022

² Sri Issundari dan Yanyan M. Yani, *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional Daerah*, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 13, No. 1, Januari 2021, Hlm 104.

merupakan solusi alternatif dalam mengatasi berbagai persoalan yang terjadi karena masalah ketimpangan pembangunan baik antara pusat dan daerah maupun antar daerah kabupaten dan kota. Menghadapi persoalan tersebut, strategi pemerintah untuk mengatasi ketimpangan pembangunan nasional dengan menaruh perhatian besar terhadap pembangunan daerah perdesaan. Undang-Undang 32 tahun 2004 mengalami penyempurnaan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan salah satu wujud perhatian pemerintah dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa ini membawa perubahan besar yang mendasar bagi kedudukan dan relasi desa dengan daerah dan pemerintah meliputi aspek kewenangan, perencanaan, pembangunan, keuangan dan demokrasi desa.³

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa memberikan ruang gerak yang luas untuk mengatur perencanaan pembangunan atas dasar kebutuhan prioritas masyarakat desa tanpa terbebani oleh program-program kerja dari berbagai instansi pemerintah yang selanjutnya disebut 'otonomi desa'. Otonomi desa merupakan otonomi yang asli, bulat dan utuh serta bukan merupakan pemberian dari pemerintah. Sebaliknya pemerintah berkewajiban menghormati otonomi asli yang dimiliki oleh desa tersebut.⁴

Desa sebagai ruang teritorial terkecil dengan jumlah penduduk yang relative sedikit namun memiliki sekelumit permasalahan sosial, kesehatan dan ekonomi. Angka kemiskinan lebih tinggi apabila dipersandingkan dengan kota. Begitu juga dengan masalah kesehatan dan pendidikan masyarakat lebih dominan berada di desa. Maka pelaksanaan SDGs dilevel desa, dinilai berpotensi dan akan berkontribusi sebesar 74 persen dalam mensukseskan pencapaian tujuan SDGs.⁵

³ Nyimas Latifah Letty Aziz, *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 13, No. 2, Desember 2016, hlm 193.

⁴ HAW Widjaja, *Otonomi Desa : Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008), hlm.165.

⁵ Rina Susanti, *Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 3, April 2021: 1253-1263, DOI: 10.34007/jehss.v3i3.535, hlm 1254.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka masalah yang akan di jawab dalam penelitian ini adalah bagaimana peran desa menuju *Sustainable Development Goals* (SDGs), apa strategi desa-desa di Kabupaten Lampung Timur dalam merealisasikan SDGs desa dan apa saja yang telah dilaksanakan serta akan/perlu direncanakan menuju SDGs 2030.

Penelitian ini memiliki nilai strategis karena akan terpetakannya peran desa-desa di Kabupaten Lampung Timur menuju SDGs di Indonesia, saat ini sesuai dengan data dari Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi, berdasarkan data Indeks Desa Membangun (IDM) tahun 2021 dimana status desa di Kabupaten Lampung Timur terdiri dari desa tertinggal, berkembang dan maju. Dalam penelitian ini akan dipotret bagaimana Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) dan apa strategi/program atau kegiatan yang dilakukan oleh desa-desa tersebut. Selanjutnya hal ini akan mengarah pada kebijakan yang akan diambil pemerintah desa di tahun yang akan datang yang direalisasikan dalam dokumen/aksi sesuai dengan indikator TKT pada penelitian ini yakni rancangan peraturan, penyusunan roadmap, dokumen jaringan stakeholder/masterplan, pemetaan dan pengkajian kebutuhan teknologi. Serta berkontribusi pada ilmu pengetahuan tentang hukum pemerintahan desa di Indonesia. Sedangkan manfaat untuk mitra Tenaga Pendamping Profesional dan pemerintah desa adalah pendampingan dan pelaksanaan pada desa yang profesional dengan basis data yang akurat dan inovasi yang direncanakan menuju keberhasilan SDGs Desa.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Agenda 2030 untuk pembangunan berkelanjutan (*the 2030 agenda for sustainable development* atau SDGs) adalah kesepakatan pembangunan baru yang mendorong perubahan-perubahan yang bergeser kearah pembangunan berkelanjutan yang berdasarkan hak asasi manusia dan kesetaraan untuk mendorong pembangunan sosial, ekonomi dan lingkungan hidup.

Perjalanan SDGs di Indonesia

Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs) disepakati oleh 193 negara di Sidang Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tanggal 25 September 2015. SDGs menggambarkan agenda universal yang berlaku dan harus dilaksanakan oleh semua negara. Indonesia turut mengadopsi dan melaksanakan konsep SDGs untuk tercapainya pada tahun 2030. Keseriusan Indonesia dalam pelaksanaan SDGs dapat dilihat dari regulasi/kebijakan pemerintah, dimana terbitnya Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, menunjukkan konsistensi pemerintah untuk melembagakan agenda SDGs ke dalam program pembangunan nasional. Pada masa Presiden Jokowi sangat serius dengan pelaksanaan indikator-indikator SDGs di Indonesia. Hal ini terlihat dengan masuknya program SDGs dalam RPJMN 2020-2024.⁶ SDGs berisi 17 tujuan dan 169 target yang diharapkan dapat dicapai pada tahun 2030. Adapun indikator SDGs yaitu:

⁶ [Peluncuran Localizing Sustainable Development Goals \(Sdgs\) In Lampung \(Lampungprov.Go.Id\)](https://www.lampungprov.go.id/) diakses pada 2 Maret 2022



Gambar 1
Sustainable Development Goals (SDGs)

Laporan pencapaian Indonesia dalam pelaksanaan SDGs setiap tahunnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini.



Tabel 1
Indeks pelaksanaan SDGs Indonesia 2016-2021⁷

Pada 31 Oktober 2017 pemerintah Provinsi Lampung, melalui Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung, bekerjasama dengan United Nation Development Programme (UNDP) Indonesia, menyelenggarakan kegiatan *Localizing Sustainable Development Goals (SDGs) in Lampung* atau Melokalkan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan Di Provinsi Lampung. Kegiatan ini dilaksanakan sebagai langkah lanjutan pasca disepakatinya 17 Tujuan 169

⁷ [Perjalanan Program SDGs di Indonesia, Apa Saja Pencapaiannya? \(goodnewsfromindonesia.id\)](https://goodnewsfromindonesia.id) diakses pada 1 Maret 2022

Target dan 240 Indikator sebagai agenda SDGs Global pasca berakhirnya *Millenium Development Goals (MDGs)*. Adapun ditingkat nasional, agenda SDGs telah diadaptasi melalui Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB).⁸

Dari SDGs ke SDGs Desa

Alpa terhadap desa bisa dialamatkan pada kontestasi narasi akbar pembangunan. Sejak 1945, modernisasi menghubungkan peran positif negara maju kepada negara sedang berkembang. Namun, ketika diketahui surplus negara miskin justru terserap negara maju melalui pola bantuan ini, pada dekade 1960-an berbunga paham ketergantungan. Kedua mata air paradigma pembangunan ini sama-sama menganalisis unit negara. Ketika diturunkan menjadi pembangunan regional, ukuran yang tersedia baru sampai pada level provinsi dan kabupaten, contohnya produk domestik regional bruto (PDRB). Mendasarkan semata-mata narasi akbar menghilangkan konteks lokal yang menyejarah. Akibatnya, mampu menceraubut desa dari akar sosial dan budayanya.⁹

Kebijakan otonomi desa, selain memberikan wewenang kepada Pemerintah Desa untuk mengatur rumah tangganya sendiri, ternyata juga mensyaratkan pada kemampuan Desa otonom untuk dapat membiayai pembangunan di desanya secara mandiri. Hal tersebut berarti bahwa pemerintah desa harus dapat menggali sendiri sumber-sumber pendapatan dengan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya atau melakukan usaha-usaha lain seperti yang di atur dalam undang-undang. Untuk itu dibutuhkan sumberdaya aparat pemerintah desa yang mampu mengemban amanat tersebut, sehingga kemampuan dan kualitas manusianya juga sangat dibutuhkan.¹⁰

Pengaturan tentang otonomi Desa dimaksudkan untuk merespon proses globalisasi, yang ditandai oleh proses liberalisasi (informasi, ekonomi,

⁸ [peluncuran Localizing Sustainable Development Goals \(SDGs\) In Lampung \(lampungprov.go.id\)](http://lampungprov.go.id) diakses pada 2 Maret 2022

⁹ [SDGs Desa – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](http://kemendesa.go.id) diakses pada 1 Maret 2022

¹⁰ Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)** MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014, Hlm 315.

teknologi, budaya, dan lain-lain) dan munculnya pemain-pemain ekonomi dalam skala global. Dampak globalisasi dan eksploitasi oleh kapitalis global tidak mungkin dihadapi oleh lokalitas, meskipun dengan otonomi yang memadai. Tantangan ini memerlukan institusi yang lebih kuat (dalam hal ini negara) untuk menghadapinya.

Konsep pembangunan desa pada undang-undang desa serta kekurangan dari ukuran pembangunan desa (Indeks Pembangunan Desa/IPD dan Indeks Membangun Desa/IDM) sehingga posisi SDGs semakin penting karena selain sesuai dengan kebijakan pembangunan desa juga dibutuhkan untuk diimplementasikan ke desa sehingga peluang keberhasilan pencapaian SDGs pada satu desa menjadi maksimal. Pada tataran kebijakan, SDGs ini langsung ditempatkan pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi No. 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 sebagai acuan bagi desa untuk penyusunan kegiatan dan penganggaran tahunan masing-masing desa. Namun demikian, pada bagian ini penulis nampaknya masih perlu menjelaskan lagi secara lebih rinci mengenai proses perumusan kebijakan dan contoh implementasi peraturan tersebut sehingga lebih mudah dipahami secara teknis oleh desa. Penggunaan pilihan kata atau kalimat “tanpa banyak cincong, SDGs langsung ditempatkan pada Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi”. Dalam peraturan menteri tersebut mengatur bahwa pelokalan SDGs menjadi SDGs Desa tidak berlangsung dari atas kebawah tetapi menyesuaikan SDGs agar sesuai konteks desa yang selama ini memberikan kekhususan dalam pembangunan.¹¹

SDGs Desa berturut-turut mencakup tujuan Desa Tanpa Kemiskinan, Desa Tanpa Kelaparan, Desa Sehat dan Sejahtera, Pendidikan Desa Berkualitas, Keterlibatan Perempuan Desa, Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi. Tujuan berikutnya ialah Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan, Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata, Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan, Desa Tanpa Kesenjangan, Kawasan Permukiman Desa Aman dan Nyaman, Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan. Berikutnya tujuan Desa Tanggap Perubahan Iklim, Desa Peduli

¹¹ A. Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Jurnal Wacana Kinerja Volume 24 Nomor 1 Juni 2021, hlm 139.

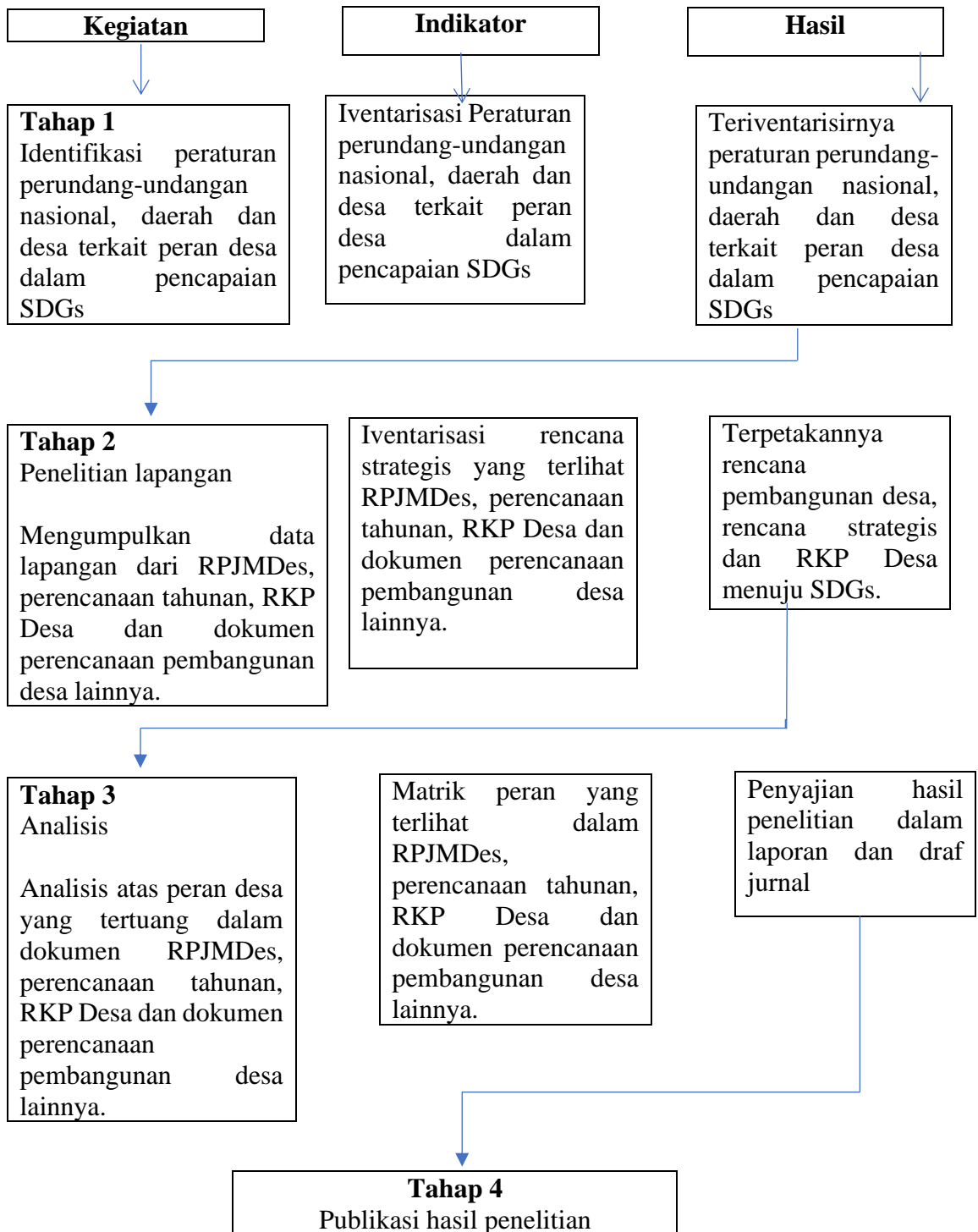
Lingkungan Laut, Desa Peduli Lingkungan Darat. Lalu tujuan Desa Damai Berkeadilan, Kemitraan untuk Pembangunan Desa, Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif.

Dalam Peraturan Menteri Desa, PDT, dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang prioritas penggunaan dana desa tahun 2022 disebutkan bahwa SDGs desa adalah upaya terpadu pembangunan desa untuk percepatan pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan. Dalam Pasal 5 Permendes ini dapat kita lihat bahwa prioritas penggunaan dana desa diarahkan untuk program dan/atau kegiatan percepatan pencapaian SDGs Desa melalui; pemulihan ekonomi nasional sesuai kewenangan desa, program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dan mitigasi dan penanganan bencana alam dan nonalam sesuai kewenangan desa.

BAB III

METODOLOGI

Ragaan 1. Tahapan Kegiatan Penelitian



Tabel 2
Pembagian tugas

| No | Nama | Peran/Tanggung jawab |
|----|---|--|
| 1 | Siti Khoiriah, S.H.I, M.H. (Ketua) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengkoordinasikan penelitian. 2. Komunikasi dengan mitra. 3. Melaksanakan penelitian lapangan. 4. Mengawal target TKT. 5. Menuliskan draf jurnal internasional. |
| 2 | Dr. Candra Perbawati, S.H., M.H. (anggota 1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mitra diskusi dalam pencapaian tujuan penelitian. 2. Melaksanakan penelitian lapangan. 3. Mengawal target TKT. 4. Membuat laporan keuangan. |
| 3 | Zenny Nurmayanti (mahasiswa 1) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan rincian penggunaan anggaran penelitian. 2. Meneliti penggunaan anggaran. 3. Mengikuti penelitian ke lapangan. |
| 4 | Luzman Qashmal (mahasiswa 2) | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyiapkan administrasi penelitian. 2. Mendokumentasikan kegiatan penelitian. 3. Mengikuti penelitian ke lapangan. |

Objek Penelitian (jenis material yang diteliti dan segi penelitian):

Peran desa-desa di Kabupaten Lampung Timur dalam pelaksanaan SDGs desa dan strategi apa saja yang telah dilaksanakan oleh desa-desa, program/kegiatan apa saja yang mereka sedang dilaksanakan dan perencanaan untuk tahun-tahun kedepan menuju pencapaian SDGs.

Masa pelaksanaan

Mulai : April Tahun 2022

Berakhir : Oktober Tahun 2022

Usulan biaya Rp. 40.000.000

Lokasi penelitian: Desa-desa di Kabupaten Lampung Timur

Instansi lain yang terlibat: Tenaga Profesional Pendamping Desa dan Pemerintah Desa

Kontribusi mendasar pada suatu bidang ilmu:

Penelitian ini memiliki nilai strategis karena akan terpetakannya peran desa-desa di Kabupaten Lampung Timur menuju SDGs di Indonesia, bagaimana rencana jangka menengah desa dan apa saja program/kegiatan yang dilaksanakan oleh desa-desa tersebut. Selanjutnya hal ini akan mengarah pada kebijakan yang akan diambil oleh desa ditahun yang akan datang. Serta berkontribusi pada ilmu pengetahuan tentang hukum pemerintahan desa di Indonesia.

Rencana Publikasi

Jurnal/monograf terindeks *scopus/web of science*

BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Konsep SDGs Desa

Sustainable Development Goals (SDGs) adalah kelanjutan dari *Millenium Development Goals* (MDGs) yang berakhir tahun 2015. *Sustainable Development Goals* (SDGs) didefinisikan sebagai kerangka kerja untuk 15 tahun kedepan hingga tahun 2030. Berbeda dengan *Millenium Development Goals* (MGDs) yang lebih bersifat birokratis dan teknokratis, penyusunan butir-butir SDGs lebih inklusif melibatkan banyak pihak termasuk organisasi masyarakat sipil.(<http://theicph.com>).

Tahun 2019 Indonesia berkomitmen untuk berhasil mengimplementasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Goals*, SDGs) sebagai agenda pencapaian pembangunan di tahun 2030. Dalam hal ini, Peraturan Presiden Indonesia No.59/2017 tentang implementasi SDGs di Indonesia mengamanatkan Kementerian Nasional Perencanaan Pembangunan Republik Indonesia untuk menyediakan roadmap SDGs Indonesia.¹²

Penyusunan SDGs sendiri memiliki beberapa tantangan karena masih terdapat beberapa butir-butir target MDGs yang belum bisa dicapai dan harus diteruskan di dalam SDGs. Seluruh tujuan, target dan indicator dalam dokumen SDGs juga perlu mempertimbangkan perubahan situasi global saat ini. Mulai tahun 2016, SDGs secara resmi menggantikan MDGs. SDGs berisi seperangkat tujuan transformatif yang disepakati dan berlaku bagi seluruh bangsa tanpa terkecuali. SDGs berisi 17 tujuan, Salah satu dari tujuan tersebut ialah mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan dan meningkatkan gizi, serta mendorong pertanian yang berkelanjutan. Dalam tujuan tersebut SDGs memiliki target-target yang harus tercapai, target tersebut juga meneruskan apa yang belum diselesaikan pada

¹² Tundjung Linggarjati, Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI" 12-14 Oktober 2021 Purwokerto ISBN 978-602-1643-67-9, hlm 362.

program MDGs yang hanya meningkatkan pendapatan dan mengakhiri kemiskinan juga kelaparan.

Dalam melaksanakan tujuan yang termaktub dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, yakni:

1. pengakuan dan penghormatan atas Desa yang memiliki keberagamannya;
2. kejelasan status dan kepastian hukum atas Desa dalam NKRI demi mewujudkan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia;
3. melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat Desa;
4. mendorong prakarsa, gerakan, dan partisipasi masyarakat Desa untuk pengembangan potensi dan Aset Desa guna kesejahteraan bersama;
5. membentuk Pemerintahan Desa yang profesional, efisien dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab;
6. meningkatkan pelayanan publik bagi warga masyarakat Desa guna mempercepat perwujudan kesejahteraan umum;
7. meningkatkan ketahanan sosial budaya masyarakat Desa guna mewujudkan masyarakat Desa yang mampu memelihara kesatuan sosial sebagai bagian dari ketahanan nasional;
8. memajukan perekonomian masyarakat Desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional; dan
9. memperkuat masyarakat Desa sebagai subjek pembangunan.

Penelitian ini akan fokus pada SDGs Desa. SDGs Desa merupakan kebijakan pemerintah Indonesia yang dalam hal ini Kementerian Desa PDTT untuk mencapai tujuan SDGs nasional. SDGs Desa merupakan turunan dari Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs Nasional. Tujuannya SDGs Desa ini sebagai upaya terpadu untuk mewujudkan tercapainya tujuan pembangunan nasional berkelanjutan atau SDGs nasional, Terdapat perbedaan antara SDGs nasional dengan SDGs Desa yaitu pada SDGs Global dan SDGs nasional tidak mengatur tentang kearifan lokal dan adat istiadat di desa. Makanya dalam SDGs Desa kami

tambah satu poin yang mengatur tentang kearifan lokal, agar pemerintah desa membangun desanya sesuai dengan kearifan lokal yang ada.¹³

Desa mandiri adalah desa yang dapat memenuhi kebutuhannya sendiri tanpa tergantung dari bantuan pemerintah. Beberapa faktor yang mempengaruhi suatu desa menuju desa mandiri, adalah potensi sumber daya manusia, potensi sumber daya alam, potensi pembeli (pasar), kelembagaan, dan budaya lokal. Konsep desa mandiri adalah pola pengembangan pedesaan berbasis konsep terintegrasi mulai dari subsistem input, subsistem produksi primer, subsistem pengolahan hasil, subsistem pemasaran, dan subsistem layanan dukungan (*supporting system*). Pengembangan yang akan dilakukan pada desa mandiri, adalah pengembangan potensi ekonomi, sosial, dan lingkungan hidup di desa, pengembangan kemandirian berusaha dan kewirausahaan di desa, pengembangan kualitas SDM dan penguatan kelembagaan masyarakat desa, serta pengembangan jejaring dan kemitraan. Manfaat dari desa yang telah mandiri, adalah berkembangnya potensi desa untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayahnya melalui penciptaan lapangan kerja, meningkatnya kegiatan usaha ekonomi dan budaya berbasis kearifan lokal di desa, meningkatnya kemandirian desa dalam melaksanakan kegiatan pembangunan, serta menurunnya disparitas pembangunan wilayah antara desa dengan kota.¹⁴

IDM lebih menyatakan fokus pada upaya penguatan otonomi Desa. Indeks ini mengikuti semangat nasional dalam upaya peningkatan kualitas kehidupan Desa seperti yang dinyatakan sangat jelas dalam dokumen perencanaan pembangunan nasional melalui optimalisasi pelaksanaan UU No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa (UU Desa), serta komitmen politik *membangun Indonesia dari Desa* melalui pembentukan kementerian Desa (Kementerian Desa, Pembangunan Daerah

¹³ <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkahkonkret-bangun-bangsa>

¹⁴ Fatmawati, dkk, *Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattalassang Kabupaten Gowa*, Journal of Public Policy and Management, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020, hlm 16-17.

Tertinggal dan Transmigrasi) dalam kepemimpinan pemerintahan Kabinet Kerja Jokowi - Jusuf Kalla.¹⁵

Indeks Desa Membangun tahun 2015 merupakan indeks komposit yang dibangun dari dimensi sosial, ekonomi dan budaya. Ketiga dimensi terdiri dari variabel, dan setiap variable diturunkan menjadi indikator operasional. IDM mengklasifikasi Desa dalam lima (5) status, yakni: (i) Desa Sangat Tertinggal; (ii) Desa Tertinggal; (iii) Desa Berkembang; (iv) Desa Maju; dan (v) Desa Mandiri. Klasifikasi Desa tersebut untuk menunjukkan keragaman karakter setiap Desa dalam rentang skor 0,27 – 0,92 Indeks Desa Membangun. Klasifikasi dalam 5 status Desa tersebut juga untuk menajamkan penetapan status perkembangan Desa dan sekaligus rekomendasi intervensi kebijakan yang diperlukan.¹⁶

B. Tujuan Pembangunan Desa

Terdapat 18 poin yang menjadi tujuan pembangunan desa dimana poin 1-17 merupakan poin SDGs nasional dan untuk SDGs desa ditambahkan satu poin yang melibatkan partisipasi kelembagaan, budaya dan kearifan lokal.



Gambar 2
SDGs Desa

¹⁵ *Indeks Desa Membangun*, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, hlm 2.

¹⁶ *Indeks Desa Membangun*, hlm 6

1. Desa Tanpa Kemiskinan

Tujuan ini menargetkan pada tahun 2030 kemiskinan di desa mencapai 0 persen. Artinya, pada tahun 2030, tidak boleh ada penduduk miskin di desa. Untuk mencapai target tersebut, tentu banyak kebijakan yang harus diambil dan dilaksanakan bersama-sama, dalam rangka pencapaian tujuan Desa tanpa kemiskinan, baik oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah maupun pemerintah desa, seperti, meningkatkan pendapatan penduduk miskin, menjamin akses terhadap pelayanan dasar serta melindungi seluruh masyarakat dari segala bentuk bencana.¹⁷

Saat ini, kemiskinan masih menjadi problem semua negara di dunia. Karena itulah, agenda utama SDGs adalah menghapuskan kemiskinan di dunia pada tahun 2030. Dalam Outcome Document Transforming Our World: The 2030 Agenda For Sustainable Development, disebutkan tujuan utama pembangunan adalah mengakhiri kemiskinan dalam segala bentuk dimanapun (*end poverty in all its forms everywhere*).

Dalam RPJPN 2005-2025, masalah kemiskinan dilihat dalam kerangka multidimensi, karenanya kemiskinan bukan hanya terkait ukuran pendapatan, melainkan menyangkut beberapa hal, antara lain: (i) kerentanan dan kerawanan orang atau masyarakat untuk menjadi miskin; (ii) menyangkut ada/tidak adanya pemenuhan hak dasar warga dan ada/tidak adanya perbedaan perlakuan seseorang atau kelompok masyarakat dalam menjalani kehidupan secara bermartabat.

Untuk mengukur kemiskinan, Badan Pusat Statistik (BPS) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (*basic needs approach*). Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan, yang diukur dari sisi pengeluaran. Jadi, penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran perkapita perbulan dibawah garis kemiskinan.

Jumlah penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang. Dibandingkan dengan Maret 2019, jumlah penduduk miskin Indonesia meningkat

¹⁷ [Kemiskinan – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

sebanyak 1,28 juta orang. Persentase penduduk miskin pada Maret 2020 tercatat sebesar 9,78 persen, meningkat 0,37 persen dari Maret 2019. Sedangkan berdasarkan daerah tempat tinggal, persentase tingkat kemiskinan di desa pada Maret 2020 sebesar 12,82 persen, turun 0,03 persen dari bulan Maret 2019 yang mencapai 12,85 persen, sedangkan tingkat kemiskinan di wilayah kota malah naik 0,69 persen, dari 6,69 persen menjadi 7,38 persen

2. Desa Tanpa Kelaparan

Pada tahun 2030, tujuan ini menargetkan tidak ada kelaparan di desa, juga desa mencapai kedaulatan pangan, memperbaiki nutrisi dan mempromosikan pertanian yang berkelanjutan. Tujuan ini sejalan dengan prioritas pembangunan Indonesia yang termaktub dalam prioritas ketahanan pangan dan penciptaan lapangan kerja.

Kelaparan seringkali didefinisikan sebagai kondisi kekurangan asupan kalori pada seseorang (GHI, 2019), kekurangan jumlah makanan untuk memenuhi kebutuhan tubuh dapat beraktivitas dan hidup sehat (Fan dan Polman, 2014). Menurut FAO (2008), kelaparan biasanya dipahami sebagai penyakit yang disebabkan oleh kekurangan energi dari makanan yang dikonsumsi tidak mencukupi.

Global Hunger Index (2019) menunjukkan tingkat kelaparan dan kekurangan gizi di dunia terus mengalami penurunan sejak tahun 2000. Penurunan tingkat kelaparan ini berkaitan dengan turunnya angka kemiskinan dunia dari 28,6 persen pada tahun 1999 menjadi 9,9 persen. Dari riset tersebut diketahui bahwa, indeks kelaparan di Indonesia masuk dalam kategori *serious* dengan skor sebesar 20,1. Dari 117 negara, Indonesia menempati peringkat 70.

Secara nasional rata-rata konsumsi kalori perkapita perhari penduduk Indonesia pada Maret 2019 sebesar 2.120,52 Kkal. Ini sudah berada di atas standar kecukupan. Konsumsi protein sebesar 62,13 gram perkapita perhari, juga sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein.

Apabila dilihat menurut klasifikasi daerah tempat tinggal, rata-rata konsumsi kalori perkapita sehari penduduk di daerah perkotaan sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi kalori perkapita sehari, yaitu sebesar 2.119,77 Kkal,

sedangkan di perdesaan angkanya juga sudah melampaui standar kecukupan konsumsi kalori perkapita sehari, yaitu 2.121,47 Kkal. Baik di daerah perkotaan maupun di perdesaan, konsumsi protein perkapita perhari sudah berada di atas standar kecukupan konsumsi protein. Konsumsi protein perkapita sehari penduduk di daerah perkotaan lebih tinggi dibandingkan di daerah perdesaan, yaitu 64,42 gram di daerah perkotaan berbanding 59,23 gram di daerah perdesaan.

Agenda kedua SDGs Desa adalah mengakhiri segala jenis kelaparan di desa pada tahun 2030 serta mengupayakan terciptanya ketahanan pangan, untuk menjamin setiap orang memiliki ketahanan pangan yang baik menuju kehidupan yang sehat. Pencapaian tujuan ini membutuhkan perbaikan akses terhadap pangan dan peningkatan produksi pertanian secara berkelanjutan, yang mencakup peningkatan produktivitas dan pendapatan petani, pengembangan teknologi dan akses pasar, sistem produksi pangan yang berkelanjutan, serta nilai tambah produksi pertanian.¹⁸

3. Desa Sehat dan Sejahtera

Tujuan ini dimaksudkan untuk menjamin kehidupan warga desa yang sehat demi terwujudnya kesejahteraan. Tujuan ini menyaratkan tersedianya akses yang mudah terhadap layanan kesehatan bagi warga desa.

Hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2018 menunjukkan, bahwa proporsi pengetahuan rumah tangga terhadap kemudahan akses ke rumah sakit, dilihat dari jenis transportasi, waktu tempuh dan biaya, hasilnya adalah: mudah 37,1 persen; sulit 36,9 persen; dan sangat sulit 26 persen.

Untuk itulah, dalam rangka mencapai tujuan SDGs Desa tersebut, pemerintah desa dan supra desa harus menjamin tersedianya: akses warga desa terhadap layanan kesehatan; terjangkaunya jaminan kesehatan bagi warga desa; menurunnya angka kematian ibu (AKI); angka kematian bayi (AKB); peningkatan pemberian imunisasi lengkap pada bayi; prevalensi pemakaian kontrasepsi; pengendalian penyakit HIV/AIDS, TBC, obesitas, malaria, kusta, filariasis (kaki gajah);

¹⁸ [SDGs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

pengendalian penyalahgunaan narkoba, serta menurunnya angka kelahiran pada usia remaja.¹⁹

4. Pendidikan Desa Berkualitas

Pembangunan berupaya meningkatkan pendapatan bagi penduduk miskin desa, menjamin akses warga desa terhadap pelayanan dasar, serta melindungi seluruh warga desa dari segala bentuk bencana. Untuk mencapai tujuan peningkatan pendapatan bagi penduduk miskin desa, maka target utama dari tujuan ini adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) desa. Pendidikan merupakan bentuk investasi yang menentukan masa depan bangsa. Pendidikan menjadi syarat peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) desa. Oleh karena itu, pemerintah desa bersama-sama dengan supra desa harus memastikan ketersediaan dan keterjangkauan layanan pendidikan yang berkualitas bagi warga desa, serta akses yang mudah bagi warga desa terhadap layanan pendidikan.

Dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019, angka melek huruf wilayah perdesaan lebih rendah dibandingkan dengan angka melek huruf wilayah perkotaan (BPS, 2019). Pada tahun 2019, angka melek wilayah perdesaan sebesar 93,56 persen, sedangkan angka melek huruf wilayah perkotaan mencapai 97,71 persen. Oleh karena itu, pencapaian SDGs Desa Keempat ini sangat penting dalam mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

Selain itu, rata-rata lama sekolah di Indonesia masih sangat rendah. Pada tahun 2018 rata-rata lama sekolah penduduk Indonesia baru 8,17 tahun, kemudian mengalami sedikit peningkatan pada tahun 2019 menjadi 8,34 tahun. Artinya, rata-rata penduduk Indonesia tidak dapat menamatkan pendidikan menengah pertama, atau putus sekolah pada tahun terakhir pendidikan menengah pertama.

Oleh karena itu, untuk mencapai tujuan SDGs Desa Pendidikan Desa Berkualitas, maka yang harus dilakukan oleh pemerintah desa dengan dukungan dari supra desa adalah: akses warga desa terhadap layanan pendidikan terakreditasi; akses warga

¹⁹ [SDGs Desa Nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

desa terhadap lembaga pendidikan pesantren; serta memastikan tersedianya layanan pendidikan yang berkualitas dan terjangkau untuk warga desa.

Selain itu, tujuan ini berfokus pada tersedianya layanan pendidikan keterampilan bagi warga desa, layanan pendidikan pra sekolah, pendidikan non formal, serta ketersediaan taman bacaan atau perpustakaan desa.²⁰

5. Keterlibatan Perempuan Desa

Dengan tujuan ini, pemerintah desa dengan dukungan dari berbagai pihak menjadi garda terdepan dalam pengarusutamaan gender. Pada tahun 2030, Tujuan SDGs Desa adalah terciptanya kondisi yang menempatkan semua warga desa dalam posisi yang adil, tanpa diskriminasi terhadap perempuan dalam segala aspek kehidupan.

Selain memberikan perlakuan yang adil, dibuka kesempatan yang sama dalam urusan publik bagi perempuan desa. Tercapainya tujuan SDGs Desa ini juga menyaratkan penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak.

Beberapa indikator tercapainya tujuan SDGs Desa ini adalah: tersedianya ruang dan kesempatan bagi keterlibatan perempuan dalam pemerintahan desa, baik sebagai aparatur desa maupun dalam Badan Perwakilan Desa (BPD); median usia kawin pertama perempuan; layanan kesehatan untuk perempuan, dan layanan pendidikan untuk perempuan; serta keterlibatan perempuan dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan desa.²¹

6. Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi

Air bersih dan sanitasi layak adalah kebutuhan dasar manusia. Pemenuhan air bersih dan sanitasi yang layak masih menjadi problem di seluruh dunia. Karena itulah, pemenuhan atas kebutuhan air bersih, air minum dan sanitasi menjadi tujuan pembangunan berkelanjutan. Pada periode 2015 sampai tahun 2019, persentase

²⁰ [SDGs Desa Nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

²¹ [SDGs Desa Nomor 5: Keterlibatan Perempuan Desa – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

akses rumah tangga terhadap air minum layak, baik di wilayah perkotaan maupun wilayah perdesaan mengalami peningkatan.

Tercapainya tujuan SDGs Desa ini dapat diukur dari beberapa hal, seperti: akses rumah tangga terhadap air minum dan sanitasi layak mencapai 100 persen pada tahun 2030; terjadinya efisiensi penggunaan air minum; serta adanya aksi melindungi dan merestorasi ekosistem terkait sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, sungai, air tanah, dan danau.²²

7. SDGs Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan

Selama 10 tahun terakhir produksi minyak bumi di Indonesia menunjukkan kecenderungan penurunan, dari 346 juta barel (949 ribu bph) pada tahun 2009 menjadi sekitar 283 juta barel (778 ribu bph) di tahun 2018 (DEN, 2019). Penyebabnya antara lain kondisi sumur-sumur di Indonesia yang semakin tua. Di sisi lain, kebutuhan terhadap energi semakin meningkat, yang salah satunya disebabkan penambahan penduduk yang meningkatkan pertumbuhan kebutuhan penduduk terhadap energi. Selain itu, peningkatan infrastruktur dan peningkatan teknologi pendukung untuk menyediakan energi yang lebih bersih dan efisien di semua negara dapat memicu pertumbuhan positif serta membantu mengurangi dampak lingkungan (Institute for Essential Services Reform, 2019)

Energi merupakan penggerak perekonomian dan prasyarat dalam pembangunan. Ketersediaan energi yang cukup dan terjangkau dapat mendukung pemenuhan kebutuhan dasar seperti pangan, pelayanan kesehatan, pendidikan yang berkualitas, yang mendukung pembangunan manusia berkualitas. Penyediaan akses energi yang lebih luas di daerah dan desa terpencil, di mana akses energinya sangat terbatas, telah berkontribusi pada peningkatan pendapatan masyarakat secara nyata (Mursanti dan Tumiwa, 2019)

Rasio elektrifikasi merupakan indikator yang digunakan pemerintah untuk mengukur jangkauan penyediaan energi di Indonesia, yang didefinisikan sebagai

²² [SDGs Desa Nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

jumlah rumah yang tersambung dengan listrik tanpa melihat kualitas penyediaan listrik yang diterima. Sampai tahun 2019, tidak semua desa di Indonesia teraliri listrik. Data Kementerian Desa, PDT dan Transmigrasi menunjukkan bahwa, pada hingga tahun 2019, sebanyak 1.667 desa di Indonesia yang mencakup 258.252 keluarga sama sekali tidak memiliki fasilitas kelistrikan.

Dalam Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik, PLN merencanakan untuk melanjutkan penyediaan listrik desa sesuai dengan Road Map Listrik Desa 2017 – 2021 sebagai bagian dari upaya mencapai target elektrifikasi sebesar 99,7% pada 2025.

Strategi listrik desa yang diambil adalah melakukan perluasan jaringan distribusi yang sudah ada dan membangun pembangkit energi terbarukan serta pembangkit hibrid untuk desa-desa yang sangat terpencil serta penggunaan pembangkit berbahan bakar minyak/BBM (PLN, 2017). Program listrik desa pada tahun 2019 menargetkan 1.746 desa.

Tujuan SDGs Desa ini memastikan semua orang memiliki akses terhadap energi terbarukan. Capaian tujuan ini sampai tahun 2030 dapat diukur dengan beberapa indikator, di antaranya: konsumsi listrik rumah tangga di Desa mencapai minimal 1.200 kWh; Rumah tangga di Desa menggunakan gas atau sampah kayu untuk memasak; penggunaan bauran energi terbarukan di desa.²³

8. Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata

Menghadapi Pandemi Covid-19, ekonomi Indonesia dan bahkan dunia menghadapi tantangan yang sangat berat. Pada triwulan II-2020, BPS (2020) merilis terjadinya kontraksi ekonomi Indonesia sebesar -5,32. Akibatnya, penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2020 mencapai 26,42 juta orang, atau 9,78 persen. Jumlah ini mengalami peningkatan 1,28 juta orang, atau naik 0,37 persen dari Maret 2019. Di perdesaan, jumlah orang miskin turun 0,03 persen, sedangkan di perkotaan naik 0,69 persen.

²³ [SDGs Desa Nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

Hal serupa terjadi dengan Nilai Tukar Petani (NTPT) yang mengalami penurunan dari 99,94 pada bulan Juli 2020 menjadi 98,64 pada bulan Agustus 2020, atau turun sebesar 1,31. Sebelumnya, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Indonesia pada Februari 2020 mencapai 4,99 persen, turun 0,02 persen poin dibanding TPT Februari 2019.

Pertumbuhan ekonomi yang disertai pemerataan hasil pembangunan menjadi target utama tujuan SDGs Desa ini, di antaranya dengan cara menciptakan lapangan kerja yang layak, serta membuka peluang ekonomi baru bagi semua warga desa. Indikator keberhasilan tujuan ini mencakup terserapnya angkatan kerja dalam lapangan kerja; terlaksananya padat karya tunai desa yang mampu menyerap 50 persen angkatan kerja desa; tempat kerja yang memberikan rasa aman dan dilengkapi dengan fasilitas layanan kesehatan.²⁴

9. Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan

Modal fisik dan sumber daya manusia berperan penting dalam pertumbuhan ekonomi. Ketersediaan modal fisik sangat terkait dengan ketersediaan dana investasi (Maryaningsih, dkk: 2014). Studi dari World Bank (1994) menyebutkan elastisitas PDB (Produk Domestik Bruto) terhadap infrastruktur di suatu negara adalah antara 0,07 sampai dengan 0,44. Hal ini berarti dengan kenaikan 1 (satu) persen saja ketersediaan infrastruktur akan menyebabkan pertumbuhan PDB sebesar 7% sampai dengan 44%, ini angka yang cukup signifikan.

Oleh karena itu, untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang positif, maka keandalan infrastruktur desa sangat menentukan. Mulai dari infrastruktur jalan desa, jalan poros desa, maupun infrastruktur lainnya, yang mendukung aktivitas ekonomi warga desa, seperti infrastruktur bidang pertanian, perikanan, serta sektor-sektor lainnya.

Selain infrastruktur, SDGs Desa juga menekankan lahirnya inovasi di desa dalam semua bidang, seperti ekonomi, pelayanan publik, serta produk-produk unggulan desa. Oleh karena itu, SDGs Desa menggunakan beberapa indikator keberhasilan

²⁴ [SDGs Desa Nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa maupun supra desa, di antaranya: kondisi jalan yang andal; dermaga/tambatan perahu; pertumbuhan industri di desa; serta kontribusi industri terhadap pertumbuhan ekonomi desa.²⁵

10. Desa Tanpa Kesenjangan

Isu kesenjangan selalu menyertai aktivitas pembangunan. Kesenjangan pendapatan dan kekayaan telah menjadi isu global dan cenderung meningkat pada beberapa dekade terakhir, bahkan di negara-negara berkembang kesenjangan meningkat hingga 11%. Saat ini 1% populasi terkaya di dunia menguasai hingga 40% aset global, sementara 10% penduduk miskin dunia hanya mendapatkan 2% hingga 7% (Oxfam, 2020).

Perencanaan pembangunan yang sentralistik, tidak mempertimbangkan kondisi spasial, lebih besar kemungkinannya untuk memperparah kesenjangan, baik kesenjangan antar daerah maupun kesenjangan antar orang. Kesenjangan merupakan indikator bahwa hasil pembangunan ekonomi suatu daerah atau negara, tidak dinikmati secara merata oleh berbagai kelompok kesejahteraan. Oleh karena itu, upaya penurunan ketimpangan menjadi upaya penting dalam mengatasi kemiskinan (Yusuf dan Summer, 2015).

Pada Maret 2020 tingkat ketimpangan pengeluaran penduduk Indonesia yang diukur oleh Gini Ratio adalah sebesar 0,381 (BPS, 2020). Angka ini meningkat 0,001 poin jika dibandingkan dengan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,380, walaupun menurun 0,001 poin dibandingkan dengan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,382. Gini Ratio di daerah perkotaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,393, naik dibandingkan Gini Ratio September 2019 sebesar 0,391 dan Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,392. Sedangkan Gini Ratio di daerah perdesaan pada Maret 2020 tercatat sebesar 0,317, naik dibandingkan Gini Ratio September 2019 yang sebesar 0,315, namun tidak berubah dibanding Gini Ratio Maret 2019 sebesar 0,317.

²⁵ [SDGs Desa Nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

SDGs Desa bertujuan untuk mengurangi dan menghilangkan kesenjangan tersebut pada tahun 2030. Untuk itulah, keberhasilan capaian tujuan ini diukur dengan koefisien Gini desa; tingkat kemiskinan di desa; status perkembangan desa; serta indeks kebebasan sipil di desa.²⁶

11. Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman

Pemukiman adalah kebutuhan dasar manusia yang harus dipenuhi, agar manusia dapat menjalankan fungsi-fungsi sosial dan ekonomi di tengah-tengah masyarakat. Pemenuhan hak atas pemukiman menyaratkan pemukiman yang layak, bersih, aman, dan berkelanjutan. Persentase jumlah rumah layak huni di perkotaan lebih banyak dibandingkan di perdesaan.

Tujuan ini, sampai dengan tahun 2030, menargetkan terwujudnya desa yang inklusif, aman, kuat, dan berkelanjutan, dengan beberapa target capaian kawasan permukiman yang bersih dan sehat, terciptanya keamanan lingkungan melalui swadaya masyarakat, serta terbangunnya partisipasi semua pihak dalam pembangunan desa.²⁷

12. SDGs Desa Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan

Tujuan ini berkaitan dengan upaya mengurangi dampak lingkungan yang ditimbulkan terhadap bumi melalui pola produksi dan konsumsi yang sewajarnya. Pertumbuhan ekonomi merupakan indikator penting dalam mewujudkan kesejahteraan warga. Namun demikian, pertumbuhan ekonomi yang diciptakan harus mempertimbangkan keberlanjutan. Oleh karena itu, diperlukan langkah pengurangan jejak ekologi dengan mengubah cara memproduksi dan mengkonsumsi makanan dan sumber daya lainnya. Pemisahan pertumbuhan ekonomi dari penggunaan sumber daya dan degradasi lingkungan adalah salah satu tujuan SDGs Desa.

²⁶ [SDGs Desa Nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

²⁷ [SDGs Desa Nomor 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

Efisiensi dalam pengelolaan sumber daya alam milik bersama, serta upaya mengurangi sampah beracun dan polutan adalah target penting untuk meraih tujuan ini. Salah satunya dengan mendorong warga, dunia usaha, serta konsumen untuk mendaur ulang dan mengurangi sampah. Untuk itulah, diperlukan pergeseran aktivitas produksi dan konsumsi yang lebih berkelanjutan.

Diperlukan kebijakan desa yang kondusif dan memiliki perspektif pelestarian lingkungan. Salah satunya ditentukan dengan penanganan limbah dan sampah sesuai kebutuhan. Penanganan sampah secara benar mendukung terciptanya pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.

Indikator keberhasilan SDGs Desa ini di antaranya dapat dilihat dari kebijakan desa yang mengatur tentang pengelolaan limbah dunia usaha; terjadinya efisiensi penggunaan sumber daya alam; serta usaha pengelolaan sampah rumah tangga maupun sampai dunia usaha.²⁸

13. SDGs Desa Tanggap Perubahan Iklim

Dampak perubahan iklim telah dirasakan hampir oleh seluruh negara di dunia dan telah memberikan konsekuensi buruk pada kehidupan. Menurut data UNDP (2019), emisi gas rumah kaca saat ini lebih dari 50% lebih tinggi dibandingkan tahun 1990. Kerugian ekonomi rata-rata tahunan akibat bencana terkait iklim mencapai ratusan miliar dolar. Belum lagi dampak bencana geofisik terhadap manusia yang 91% terkait dengan iklim, antara tahun 1998 dan 2017 telah menewaskan 1,3 juta orang dan menyebabkan 4,4 miliar orang terluka.

Di Indonesia, emisi Gas Rumah Kaca (GRK) meningkat hingga hampir tiga kali lipat antara tahun 1990 dan 2015 (+196 persen), dan laju peningkatannya diperkirakan akan semakin bertambah hingga tahun 2030. Sumber emisi tertinggi berasal dari deforestasi dan kebakaran hutan gambut, diikuti oleh emisi dari pembakaran bahan bakar fosil untuk energi. Selain itu, Indonesia mencatat peningkatan emisi CO² sebesar 18 persen sepanjang 2012-2017, yang disebabkan

²⁸ [SDGs Desa Nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

karena meningkatnya emisi dari pembangkit listrik, sektor industri, dan sektor transportasi. Perlu dicatat, bahwa total emisi Indonesia sangat bervariasi dari tahun ke tahun, sebagian besar sebagai akibat dari kebakaran lahan gambut.

SDGs Desa ini bertujuan untuk membantu pengurangan dampak perubahan iklim global, dengan beberapa program yang dapat dilakukan oleh pemerintah desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Keberhasilan capaian tujuan ini dapat dilihat dari beberapa indikator, salah satunya dengan indeks resiko bencana di desa.²⁹

14. SDGs Desa Peduli Lingkungan Laut

Lebih dari 3 miliar orang menggantungkan mata pencaharian pada laut dan keanekaragaman hayati pantai, dan sumber daya laut telah menyumbang sekitar \$28 triliun bagi ekonomi global setiap tahun (UN, 2019). Selain itu, lautan juga menyerap 30 persen karbon dioksida yang diproduksi manusia. Namun yang terjadi saat ini adalah kerusakan perairan pesisir yang terus menerus karena polusi dengan rata-rata 13.000 keping sampah plastik/km² lautan, pengasaman laut, dan 30 persen simpanan ikan dunia mengalami eksploitasi berlebih, jauh di bawah level di mana mereka bisa memproduksi hasil yang berkelanjutan (Bappenas, 2019)

Dengan panjang garis pantai mencapai 99.093 km dan luas wilayah perairan 6.3 juta km² (BIG, 2016), Indonesia memiliki wilayah laut yang menjadi pusat keanekaragaman hayati laut dunia. Kekayaan laut Indonesia memberikan manfaat ekonomi dan sosial untuk penduduk Indonesia. Pada tahun 2016, sektor perikanan Indonesia menyumbang Rp 76,7 miliar pada kuartal I dan Rp 77,7 miliar pada kuartal II untuk produksi domestik bruto (PDB) Indonesia (Kementerian Kelautan dan Perikanan, 2016).

Oleh karena itu, tujuan SDGs Desa ini adalah untuk melindungi pantai dan lautan. Untuk mengukur keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan beberapa indikator berikut: kebijakan desa terkait perlindungan sumberdaya laut; terjadinya peningkatan penangkapan ikan secara wajar; serta tidak terjadinya *illegal fishing*.³⁰

²⁹ [SDGs Desa Nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](http://kemendesa.go.id)

³⁰ [SDGs Desa Nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](http://kemendesa.go.id)

15. SDGs Desa Peduli Lingkungan Darat

Kebutuhan terhadap pangan terus mengalami peningkatan secara global. Pada tahun 2050, diperkirakan sebanyak 9 miliar orang akan mengisi bumi yang dikombinasikan dengan degradasi lingkungan dan urgensi lahan. Oleh karenanya perlu dilakukan upaya menjadikan lahan tetap aman dan produktif, khususnya di daratan (UN, 2018). Namun, pada tahun 2018 lahan kritis di seluruh Indonesia berjumlah 9.453.729 ha, sedangkan lahan sangat kritis mencapai 4.552.721 ha (BPS, 2020).

Demi terpenuhinya kebutuhan manusia saat ini dan masa yang akan datang, serta demi melindungi margasatwa, maka SDGs Desa ini bertujuan untuk melindungi sumber daya alam dan margasatwa. Untuk melihat keberhasilan capaian tujuan ini, digunakan indikator diantaranya kebijakan pemerintah desa terkait upaya pelestarian keanekaragaman hayati; luas lahan terbuka hijau; serta jumlah satwa terancam punah.³¹

16. SDGs Desa Damai Berkeadilan

SDGs Desa salah satunya bertujuan untuk mewujudkan kondisi desa yang aman, sehingga dapat memastikan pemerintah desa dapat bekerja secara adil dan efektif. Oleh karena itu, beberapa upaya yang harus dilakukan Pemerintah Desa dan Supra Desa adalah mengurangi segala bentuk kekerasan secara signifikan, dan menemukan solusi jangka panjang menghadapi konflik warga desa. Selama ini kejadian kejahatan di desa masih cukup tinggi.

Selama periode 2011-2018, jenis kejadian kejahatan pencurian merupakan kejahatan yang paling banyak terjadi pada Desa/Kelurahan di Indonesia, jumlahnya mencapai lebih dari 36-45 persen dari seluruh desa.

Sedangkan kejadian perkelahian massal, selama setahun terakhir terus meningkat dari 3,26 persen Desa/Kelurahan pada tahun 2011 menjadi 3,38 persen

³¹ [SDGs Desa Nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](http://kemendesa.go.id)

Desa/Kelurahan pada tahun 2014, kemudian pada 2018 meningkat kembali menjadi 3,75 persen pada 2018.

Oleh karena itu, Tujuan SDGs Desa ini menetapkan beberapa target yang harus dicapai pada tahun 2030: tidak adanya kejadian kriminalitas, perkelahian, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta kekerasan terhadap anak; lestarnya budaya gotong royong di desa; meningkatkannya indeks demokrasi di desa; serta tidak adanya perdagangan manusia dan pekerja anak.³²

17. SDGs Desa Kemitraan untuk Pembangunan Desa

Kemitraan untuk mencapai tujuan pembangunan desa ini pada dasarnya merupakan sarana pelaksanaan dan merevitalisasi kemitraan desa untuk mewujudkan seluruh tujuan pembangunan berkelanjutan. Karena, pembangunan desa tidak akan berhasil maksimal tanpa keterlibatan pihak-pihak yang terkait. Mulai dari tokoh masyarakat, pemuda penggerak desa, perempuan penggerak ekonomi desa, perguruan tinggi, dunia usaha, supra desa, tentu juga aparat desa dan Badan Permusyaratan Desa (BPD).

SDGs Desa mensyaratkan adanya kemitraan desa yang baik dengan berbagai tersebut, termasuk juga kemitraan dengan desa lain, atau dengan kelurahan. Karena hanya dengan kemitraan/kerja sama itulah pembangunan berkelanjutan dapat terwujud. Oleh karena itu, desa harus dapat meredam ego demi mewujudkan SDGs Desa 2030.

Semua sektor perlu diperbaiki dengan memanfaatkan teknologi dan pengetahuan untuk menciptakan inovasi. Setiap desa perlu melakukan kebijakan yang terorganisir dan terkoordinir khususnya dengan supra desa, perguruan tinggi maupun dengan dunia usaha.

Untuk mengukur tercapainya tujuan ini, digunakan beberapa indikator capaian, di antaranya: keberadaan dan bentuk kerja sama desa dengan pihak ketiga;

³² [SDGs Desa Nomor 16: Desa Damai Berkeadilan – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

ketersediaan jaringan internet di desa; statistik desa serta komoditas dan aktivitas ekspor oleh desa.

18. SDGs Desa Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif

Kelembagaan desa merupakan komponen yang sangat vital untuk mendorong keberlanjutan pembangunan. Karena itulah, keberadaan kelembagaan Desa harus diperkuat sehingga dapat menopang pencapaian tujuan pembangunan berkelanjutan.

SDGs Desa berusaha untuk mempertahankan kearifan lokal, serta melakukan revitalisasi dan menggerakkan seluruh elemen lembaga-lembaga di tingkat desa. Karena, keterlibatan semua elemen desa, kuat dan berfungsinya lembaga di desa dalam kehidupan masyarakat, akan menjadi penopang kehidupan kebhinnekaan di desa yang dinamis, serta pendorong tercapainya SDGs Desa.

Pada tahun 2018 partisipasi penduduk dalam kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar sudah cukup besar, yaitu sebesar 85,43 persen (BPS, 2018). Apabila dikategorikan berdasarkan tempat tinggal, penduduk perdesaan lebih banyak yang mengikuti kegiatan sosial kemasyarakatan dibandingkan penduduk perkotaan (88,56 persen berbanding 82,94 persen). Adapun tiga kegiatan sosial kemasyarakatan yang paling banyak diikuti penduduk usia 10 tahun ke atas dalam tiga bulan terakhir, yaitu kegiatan kematian (63,87 persen), keagamaan (61,87 persen) dan sosial lainnya (46,82 persen).

Untuk mencapai tujuan SDGs Desa 2030 ini, digunakan beberapa indikator di antaranya: lestarnya kegiatan tolong menolong dan gotong royong; partisipasi tokoh agama dalam kegiatan pembangunan desa; perlindungan warga desa terhadap kaum lemah dan anak yatim; pelestarian budaya desa; serta penyelesaian masalah warga berdasarkan pendekatan budaya.³³

³³ [SDGs Desa Nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

C. Tingkat keberhasilan SDGs Desa secara nasional

Tingkat keberhasilan pendataan SDGs Desa ada 88 juta warga dari 119 juta warga desa. Total 30 juta keluarga di desa, saat ini telah terdata lebih dari 29 juta keluarga. Jumlah Rukun Tetangga (RT) yang telah terdata sebanyak 470.000 RT dan desa yang telah terdata sebanyak 44.000an desa.³⁴

D. Capaian SDGs di Desa-Desa di Lampung Timur

Data yang bersumber dari dashboard SDGs yang dimiliki oleh Desa Sukadana Selatan, Desa Tanjung Kesuma dan Desa Tulus Rejo informasi dari perangkat desa bahwa sampai pada pertengahan bulan Agustus desa-desa tersebut dan sebagian besar desa di Indonesia belum selesai untuk menginput hasil kuesioner. Dapat kita lihat beberapa tujuan pembangunan desa belum terisi secara maksimal bahkan beberapa indikator belum terisi secara keseluruhan.

³⁴ [Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi \(kemendesa.go.id\)](http://kemendesa.go.id)

1. Capaian SDGs Desa Sukadana Selatan Kecamatan Sukadana

CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : LAMPUNG
 Kabupaten : KAB. LAMPUNG TIMUR
 Kecamatan : SUKADANA
 Desa : SUKADANA SELATAN



Gambar 3
 Capaian SDGs Desa Sukadana Selatan

2. Capaian SDGs Desa Tanjung Kesuma Kecamatan Purbolinggo

Demografi Desa Tanjung Kesuma

Tanjung Kesuma adalah sebuah desa di wilayah Kecamatan Purbolinggo Kabupaten Lampung Timur. Desa Tanjung Kesuma Saat ini dipimpin oleh seorang Kepala Desa bernama Sugianto HS. Sugianto HS mulai memimpin Desa Tanjung Kesuma sejak terpilih sebagai Kepala Desa dalam pemilihan kepala desa serentak yang diselenggarakan Kabupaten Lampung Timur pada Desember 2013.

Desa Tanjung Kesuma merupakan desa yang wilayahnya paling luas diantara 12 desa yang ada di Kecamatan Purbolinggo yaitu seluas 6,11 km².

Secara Geografis Batas wilayah Desa Tanjung Kesuma:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Desa Tegal Ombo Kecamatan Way Bungur
- Sebelah selatan berbatasan Dengan Desa Tegal Yoso
- Sebelah Barat berbatasan dengan Desa Tanjung Inten
- Sebelah Timur Berbatasan Dengan Wilayah Taman Nasional Way Kambas

Penduduk Desa Tanjung Kesuma mayoritas berprofesi sebagai petani. Selain bidang pertanian sebagian penduduk juga berprofesi sebagai peternak ayam petelur dan penjahit. Luas wilayah Desa Tanjung Kesuma 6,11 km dengan jumlah penduduk 4.016 jiwa.



Gambar 4
Peta Desa Tanjung Kesuma

CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : LAMPUNG
Kabupaten : KAB. LAMPUNG TIMUR
Kecamatan : PURBOLINGGO
Desa : TANJUNG KESUMA

|  Capaian Keseluruhan 42.76 | | | | | |
|--|------------------|-----------------------------------|------------------|--|------------------|
| 1 DESA TANPA KEMISKINAN | Capaian 59.97 | 2 DESA TANPA KELAPARAN | Capaian 36.51 | 3 DESA SEHAT DAN BERKEKAYAAN | Capaian 48.98 |
| 4 PENDIDIKAN DAN BUDAYA | Capaian 41.68 | 5 KETIMPULAN DEMOGRAFI | Capaian 33.79 | 6 DESA LAYAK DAN BERKUALITAS | Capaian 75.45 |
| 7 DESA BERENERGI BERSIH DAN TERKAWAL | Capaian 98.48 | 8 PERTUMBUHAN EKONOMI YANG MELAYU | Capaian 33.06 | 9 INFRASTRUKTUR BERKUALITAS DAN BERKAWAL | Capaian 38.13 |
| 10 DESA TANPA KETIDAKSAMAAN | Capaian 43.51 | 11 KEBERKAWALANAN SAMA-SAMA | Capaian 27.64 | 12 KONSUMSI DAN PRODUKSI BERKAWAL | Capaian 9.52 |
| 13 DESA TANGKAP IKLIM | Capaian 14.29 | 14 DESA AIR BERSIH DAN BERKAWAL | Capaian N/A | 15 DESA BERKEKAYAAN LAHAT DAN BERKAWAL | Capaian 4.76 |
| 16 DESA TANPA BENCANA | Capaian 85.3 | 17 MEMERIKSA KEMAMPUAN | Capaian N/A | 18 KEMERDEKAAN BERKAWAL | Capaian 33.11 |

Gambar 5
Capaian SDGs Desa Tanjung Kesuma

3. Capaian SDGs Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan






The Treasure of Sumatra

PROFIL DESA TULUS REJO

SEJARAH DESA TULUS REJO

Desa Tulus Rejo dibuka pada pertengahan tahun 1932 yang tenaganya diambil dari Jawa Timur yang masih muda dan kuat. Pemindahan penduduk ini disebut kolonisasi sejumlah 24 KK (142 jiwa). Mereka mendapat bahan perumahan darurat berupa paku, geribik, atap dari ilalang serta konsumsi tiap bulan.

Tempat tinggal perumahan tersebut dikelompokkan menjadi 2 kelompok yang disebut BEDENG dan diberi Nomor 33 dan 34, yaitu

1. Kelompok/Blok yang disebut BEDENG 33 sekarang Desa Siraman.
2. Kelompok/Blok yang disebut BEDENG 34 Sekarang Desa Tulus Rejo.

Kegiatan membuka hutan pada waktu itu sangat giat dan mulai bertanam sejak hujan mulai turun walaupun masih banyak kayu besar yang masih melintang. Pemerintahan pada waktu itu dijabat perwakilan kepala desa yang ditunjuk oleh pemerintah. Serta dibantu oleh kepala Kepala bedeng dan aparat desa lainnya yang sifatnya sementara.

Pada tahun 1933 datang lagi kolonisasi dari Jawa Tengah (Yogyakarta) sebanyak 50 KK 257 Jiwa. Pada 1939 datang lagi rombongan kolonisasi dari Jawa Tengah lalu orang-orang tersebut oleh pemerintah Belanda dibagikan tanah pekarangan 1/4 Ha dan sawah ladang 1 Ha setiap KK.

Perwakilan Kepala desa yang pertama kali adalah Marto Suwarno, melalui tunjukan pemerintah. Beliau menjabat dari Tahun 1938 - 1940.

Gambar 6
Sejarah Desa Tulus Rejo³⁵

³⁵ [SEJARAH DESA - Desa Tulusrejo](#)

Gambaran Umum Desa Tulus Rejo



GAMBARAN UMUM DESA

a. Geografis

1. Letak dan Luas Wilayah
Desa Tulus Rejo merupakan salah satu desa dari 12 desa di wilayah Kecamatan Pekalongan yang terletak 2,5 Km arah timur dari kota Kecamatan .Desa Tulus Rejo mempunyai luas wilayah seluas 565,35 Ha.

Tabel 2. Keadaan Geografis Desa Tulus Rejo

| No | Uraian | Keterangan |
|----|---|------------|
| 1 | Luas wilayah : 565,35 Ha | |
| 2 | Jumlah Dusun : 5 (Lima) 1) Dusun I 2) Dusun II (Badransari) 3) Dusun III (Gerobogan) 4) Dusun IV (Wonogiri) 5) Dusun V (Rancang Purwo) | |
| 3 | Batas wilayah : a. Utara : Desa Gantiwarno b. Selatan : Desa Siraman c. Barat : Desa Karangrejo d. Timur : Desa Jajog | |
| 4 | Topografi a. Luas kemiringan lahan (rata-rata) Datar : 565,35 Ha b. Ketinggian di atas permukaan laut (rata-rata) 700 m | |
| 5 | Hidrologi : Irigasi berpengairan teknis | |
| 6 | Klimatologi : | |
| 7 | Luas lahan pertanian a. Sawah teririgasi : 234,95 Ha b. Tegul/Ladang : 80,90 Ha | |
| 8 | Luas lahan pemukiman : 181,32 Ha | |



GAMBARAN UMUM DESA

DEMOGRAFI

Tabel 3. Demografi Desa Tulus Rejo

| No | Nama Dusun | Nama Kepala Dusun | Jumlah RT | Jumlah KK | Jiwa | Lk | Pr |
|-------|------------|-------------------|-----------|-----------|------|------|------|
| 1 | 1 | TIMBUL SANTOSO | 4 | 208 | 714 | 378 | 336 |
| 2 | 2 | HERI SUBAGIO | 7 | 363 | 1290 | 642 | 648 |
| 3 | 3 | SUBALI | 3 | 164 | 560 | 290 | 270 |
| 4 | 4 | RUSMANTO | 4 | 176 | 582 | 300 | 282 |
| 5 | 5 | RICCO DWI GORO | 2 | 93 | 309 | 156 | 153 |
| TOTAL | | | 20 | 1004 | 3455 | 1766 | 1689 |

KEADAAN SOSIAL

Tabel 4. Keadaan Sosial Desa Tulus Rejo

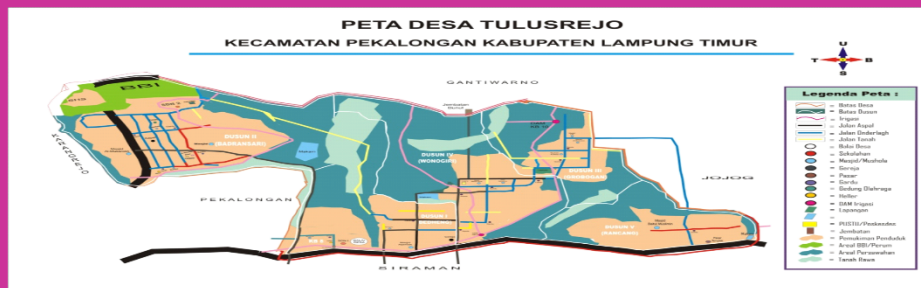
| No | Pendidikan Dalam KK | Jumlah | Laki-laki | Perempuan |
|--------|------------------------------|--------|-----------|-----------|
| 1 | TIDAK / BELUM SEKOLAH | 572 | 296 | 276 |
| 2 | BELUM TAMAT SD/SEDERAJAT | 361 | 186 | 175 |
| 3 | TAMAT SD / SEDERAJAT | 559 | 260 | 299 |
| 4 | SLTP/SEDERAJAT | 673 | 325 | 348 |
| 5 | SLTA / SEDERAJAT | 1132 | 627 | 505 |
| 6 | DIPLOMA I / II | 11 | 7 | 4 |
| 7 | AKADEMI/ DIPLOMA III/S. MUDA | 36 | 15 | 21 |
| 8 | DIPLOMA IV/ STRATA I | 122 | 55 | 67 |
| 9 | STRATA II | 2 | 1 | 1 |
| 10 | STRATA III | 0 | 0 | 0 |
| JUMLAH | | 3468 | 1772 | 1696 |
| TOTAL | | 3469 | 1772 | 1697 |

GAMBARAN UMUM DESA

IKLIM

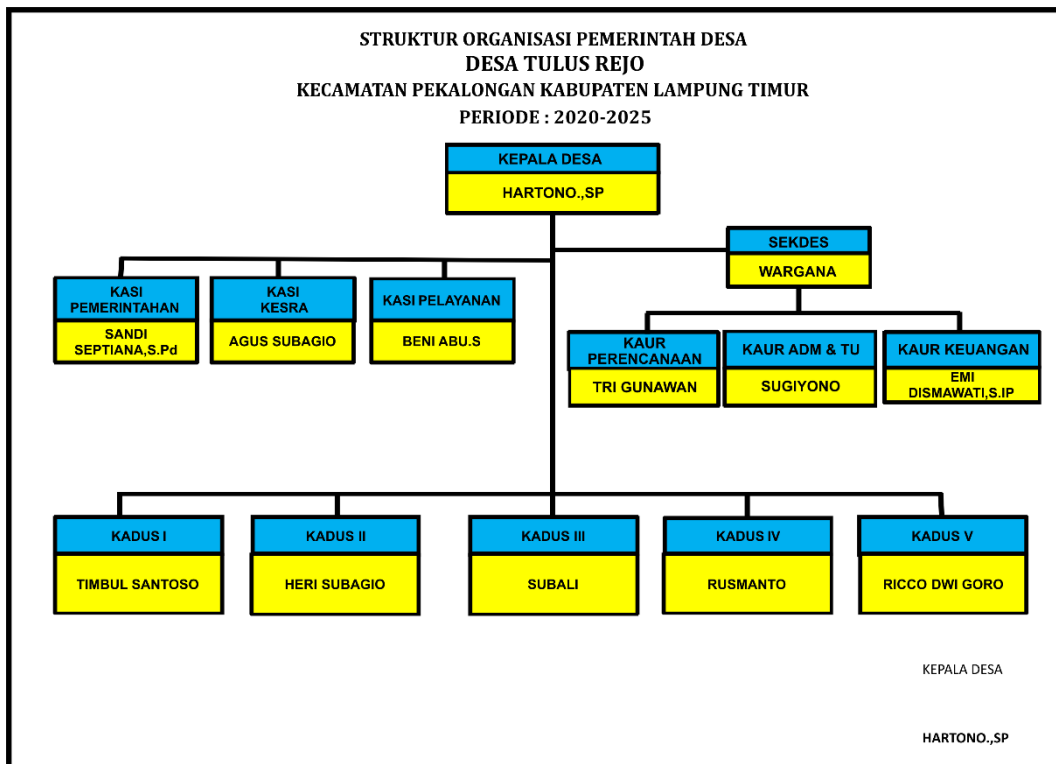
Iklm Desa Tulus Rejo sebagaimana desa-desa lain di wilayah Indonesia mempunyai iklim kemarau dan penghujan, hal tersebut mempunyai pengaruh langsung terhadap pola tanam yang ada di Desa Tulus Rejo Kecamatan Pekalongan.

Berikut peta Desa Tulus Rejo:
Gambar 1. Peta Desa Tulus Rejo



Gambar 7, 8 & 9
Gambaran umum Desa Tulus Rejo

Struktur Organisasi Pemerintah Desa



Capaian SDGs Desa Tulus Rejo

CAPAIAN SDGS DESA

Provinsi : LAMPUNG
 Kabupaten : KAB. LAMPUNG TIMUR
 Kecamatan : PEKALONGAN
 Desa : TULUSREJO



Gambar 11
 Capaian SDGs DesaTulus Rejo

BAB V
JADWAL PENELITIAN

| No | Jenis Kegiatan | Bulan ke | | | | | |
|----|--|----------|---|---|---|---|---|
| | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Persiapan/administrasi penelitian | ■ | | | | | |
| 2 | Pengumpulan bahan hukum | | ■ | | | | |
| 3 | Penelitian lapang/pengumpulan data | | | ■ | ■ | | |
| 4 | Analisis data | | | | ■ | | |
| 5 | Menulis draf paper | | | | | ■ | |
| 6 | Pembuatan draf laporan | | | | | ■ | |
| 7 | Mengikuti seminar/konferensi internasional | | | | | | ■ |
| 8 | Final report | | | | | | ■ |

BAB VI

KESIMPULAN

SDGs desa adalah bentuk implementasi dari tujuan pembangunan di desa. SDGs desa mengedepankan kearifan local sebagai titik tumpu pembangunan di desa. ada 18 poin tujuan pembangunan dalam SDGs desa, yakni: desa tanpa kemiskinan, desa tanpa kelaparan, Desa sehat dan sejahtera, Pendidikan desa berkualitas, desa berkesetaraan gender, desa layak air bersih dan sanitasi, desa yang berenergi bersih dan terbarukan, Pekerjaan dan pertumbuhan ekonomi desa. Inovasi dan infrastruktur desa, desa tanpa kesenjangan, kawasan pemukiman desa berkelanjutan, konsumsi dan produksi desa yang sadar lingkungan, pengendalian dan perubahan iklim oleh desa, ekosistem laut desa, ekosistem daratan desa, desa damai dan berkeadilan, kemitraan untuk pembangunan desa, dan kelembagaan desa dinamis dan budaya desa adaptif. SDGs desa akan sangat berpengaruh pada pembangunan di desa dimana SDGs desa akan sangat bermanfaat untuk perencanaan pembangunan di desa tahun berikutnya.

REFERENSI

Buku dan Jurnal

A.Halim Iskandar, *SDGs Desa Percepatan Pencapaian Tujuan Pembangunan Nasional Berkelanjutan*, Jurnal Wacana Kinerja | Volume 24 | Nomor 1 | Juni 2021.

Fatmawati, dkk, *Pembangunan Desa Mandiri Melalui Partisipasi Masyarakat Di Kecamatan Pattallassang Kabupaten Gowa*, Journal of Public Policy and Management, Volume 1 Nomor 1 Mei 2020.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2008).

Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.

Nyimas Latifah Letty Aziz, *Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa*, Jurnal Penelitian Politik Vol. 13, No. 2, Desember 2016.

Retno Saraswati, *Arah Politik Hukum Pengaturan Desa Ke Depan (Ius Constituendum)* MMH, Jilid 43 No. 3 Juli 2014.

Rina Susanti, *Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi*, Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 3, April 2021: 1253-1263, DOI: 10.34007/jehss. Y 3i3.535.

Sri Issundari dan Yanyan M. Yani, *Implementasi Pembangunan Berkelanjutan Dalam Mengatasi Kemiskinan Melalui Kerja Sama Internasional Daerah*, Jurnal Studi Diplomasi dan Keamanan, Volume 13, No. 1, Januari 2021.

Tundjung Linggarjati, *Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas*, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI" 12-14 Oktober 2021 Purwokerto ISBN 978-602-1643-67-9.

Website

Peluncuran Localizing Sustainable Development Goals (Sdgs) In Lampung (Lampungprov.Go.Id).

Sekilas SDGs | (bappenas.go.id).

SDGs Desa – SDGs Desa (kemendes.go.id)

Perjalanan Program SDGs di Indonesia, Apa Saja Pencapaiannya?
(goodnewsfromindonesia.id)

<https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desasebagai-langkahkonkret-bangun-bangsa>

Kemiskinan – SDGs Desa (kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan – SDGs Desa (kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera – SDGs Desa (kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 5: Keterlibatan Perempuan Desa – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan – SDGs
Desa (kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan – SDGs Desa (kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman – SDGs
Desa (kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan – SDGs
Desa (kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat – SDGs Desa
(kemendes.go.id)

SDGs Desa Nomor 16: Desa Damai Berkeadilan – SDGs Desa (kemendesa.go.id)

SDGs Desa Nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif –
SDGs Desa (kemendesa.go.id)

Sejarah Desa - Desa Tulusrejo

THE ROLE OF THE VILLAGE TOWARDS *SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS*

Siti Khoiriah and Candra Perbawati
Faculty of Law, University of Lampung
Siti.khoiriah@fh.unila.ac.id

Abstract

Village as room territorial smallest in structure government in Indonesia, the number of villages in Indonesia as many as 74,961 has very varied potentials and problems, can be seen from height number poverty, lower education as well as the minimum facility health in the village, this will be very influential significant contribution to the achievement of the SDGs in Indonesia. Constitution village give room wide range of motion for arrange planning development on base needs priority public village. Then the implementation of the SDGs is at the level village, rated potential and will contribute as big as in succeed achievement SDGs goals. Study this use method normative empirical, where researcher with based on regulation about villages, SDGs, and other related regulations close as well as village strategy identification in planning, implementation and monitoring/evaluation development going to *Sustainable Development Goals* (SDGs).

I Introduction

Law Number 6 of 2014 concerning Villages provides room wide range of motion for arrange planning development on base needs priority public village without burdened by work programs from various agency next government called autonomy village. Autonomy village is genuine autonomy, round and complete as well as no is gift from government. On the contrary government obliged honor autonomy original owned by the village that.³⁶

Village as room territorial smallest with amount relatively small population however have little bit problem social, health and economic. Poverty rate more tall if compared with city. Likewise with problem health and education public more dominant was in the village. Then the implementation of the SDGs is at the level

³⁶HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2008), p.165.

village, rated potential and will contribute by 74 percent in succeed achievement SDGs goals.³⁷

Efforts to achieve the TPB/SDGs target are: priority development national need _ synergy policy planning at the national and regional province and district / city. TPB/SDGs targets at the level national has in line with Term Development Plan Intermediate (RPJMN) 2015-2019 in form of programs, activities and indicators yang measurable and indication Support financing. TPB/SDGs are improvement of the *Millennium Development Goals* (MDGs) which are more comprehensive with involve more many countries both developed countries nor develop expand funding on rights basic human, inclusive with engagement Organization Society (Ormas) and media, philanthropy and actors business, as well as academics and experts.³⁸

Study this will focus on the Village SDGs. The Village SDGs are policy deep Indonesian government Thing this PDDT Village Ministry for reach national SDGs goals. The Village SDGs are derivative from Regulation President Number 59 of 2017 concerning implementation achievement destination development national sustainable or the National SDGs. The goal of this Village SDGs as effort integrated for realize achievement destination development national sustainable or national SDGs, yes difference between the national SDGs with the Village SDGs, namely the Global SDGs and the national SDGs no arrange about wisdom local and traditional village customs. So in the village SDGs we add one governing point about wisdom local, so that the government village build the village in accordance with wisdom existing locale.³⁹

II Research Method

Study this use approach juridical-normative with analysis implementation Regulation President Number 59 of 2017 concerning implementation achievement destination development national sustainable or National SDGs, Law concerning Villages and the Regulation of the Minister of Villages, Disadvantaged Regions and Transmigration that will capable describe regulation related with finance village SDGs Village.

III Discussion

Sustainable Development Goals (SDGs) are continuation from The end of the Millennium Development Goals (MDGs) 2015. Sustainable Development Goals

³⁷ Rina Susanti , *Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi*, Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 3, April 2021: 1253-1263, DOI: 10.34007/ jehss.v 3i3.535 , pp . 1254.

³⁸ SDGs at a [Glance | \(bappenas.go.id\)](https://bappenas.go.id), accessed on March 2, 2022

³⁹ <https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkahkonkret-bangun-bangsa>

(SDGs) are defined as framework work for 15 years forward until 2030. Different with Millennium More Development Goals (MGDs) character bureaucratic and technocratic, drafting More SDGs inclusive involve many party including organization Public civilian.

In 2019 Indonesia is committed for succeed implementing the Sustainable Development Goals (SDGs) as an achievement agenda development in 2030. In terms of this, Rules President of Indonesia No. 59/2017 concerning SDGs implementation in Indonesia mandates the Ministry of National Development Planning of the Republic of Indonesia to provide Indonesia's SDGs roadmap.⁴⁰

Preparing your own SDGs have a number of challenge because still there is a number of MDGs target items that have not been can achieved and must continued in the SDGs. Whole goals, targets and indicators in SDGs documents are also necessary consider change current global situation this. Starting in 2016, the SDGs official replace the MDGs. SDGs contain set destination agreed and applicable transformative _ for whole nation without except. The SDGs contain 17 goals, one of which is from destination the is end hunger, reach endurance food and increase nutrition, as well as push sustainable agriculture. In destination The SDGs have targets that must be achieved , the target also continues what have not completed in the MDGs program which only increase income and ending poverty is also hunger

The context of village SDGs, in doing stated goals in Constitution Number 6 of 2014 concerning Villages, namely: (i) recognition and respect over that village have its diversity ; (ii) status clarity and certainty law over the Village within the Unitary State of the Republic of Indonesia in order to realize justice for whole Indonesian people ; (iii) preserve and promote customs , traditions and culture Village community ; (iv) push initiative , movement and participation Village community for development potential and village assets to use well-being together ; (v) form Professional , efficient and effective village government , open , and responsible answer ; (vi) increase service public for inhabitant the village community speed up embodiment well-being general ; (vii) improve endurance social culture the village community realize able village community maintain unity social as part from endurance national ; (viii) advance economy village community and resolve gap development national ; and (ix) strengthen Village community as subject development .

In the Regulation of the Minister of Villages, PDT, and Transmigration Number 7 of 2021 concerning priority use of village funds 2022 is mentioned that the village SDGs is effort integrated development village for acceleration achievement destination development sustainable. In Article 5 Permendes this could our see that

⁴⁰ Tundjung Linggarjati, Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI" 12-14 October 2021 Purwokerto ISBN 978-602-1643-67-9, page 362.

priority use of village funds directed for programs and/ or activity acceleration achieving the Village SDGs through; recovery economy national in accordance authority village, priority program national in accordance authority village and mitigation and handling disaster natural and non -natural in accordance authority village.

Image 1
Village SDGs



Independent village is village that can Fulfill his need alone without depends from help government. A number of influencing factors something village going to village independent, is potency source power human, potential source power nature, potential buyers (markets), institutions, and culture local. Draft village independent is pattern development rural based draft integrated start from input sub system, subsystem primary production, subsystem processing result, subsystem marketing, and subsystems service support (*support system*). Future development done in the village independent, is development potency economic, social, and environmental village life, development independence business and entrepreneurship in the village, development HR quality and strengthening institutional public village, as well development networking and partnerships. Benefits of village that has independent, is development potency village for increase well-being community in the area through creation field work, increase activity effort economy and culture based wisdom local in the village, increasing independence village in doing activity

development, as well as decline disparity regional development between village with city.⁴¹

Village SDGs based data updating is a more detailed updating of the Village Building Index (IDM) data, because there is deepening of data at the level of RT, family, and residents so that can give information more many as a data⁴²improvement process.

IDM more state focus on effort strengthening village autonomy. Index this follow spirit national in effort enhancement quality village life as stated very clearly in document planning development national through optimization implementation of Law no. 6 of 2014 concerning Villages (Village Law), as well as commitment political *build Indonesia from the village* through formation Ministry of Villages (Ministry of Villages, Development of Disadvantaged Regions and Transmigration) in leadership government Cabinet Jokowi - Jusuf Kalla⁴³'s work.

Building Village Index 2015 is index composite built from dimensions social, economic and cultural. Third dimensions consist from variable, and each variable is derived Becomes indicator operational. IDM classifies villages into five (5) statuses, namely: (i) very disadvantaged villages; (ii) Disadvantaged Villages; (iii) Developing Villages; (iv) Advanced Village; and (v) Independent Village. Classification of the Village for show diversity character every village in range a score of 0.27 – 0.92 Index of Developing Villages. Classification in the 5 Village statuses also for sharpen determination of village development status and at the same time recommendation intervention necessary policies.⁴⁴

There are 18 points that become destination development village, where points 1-17 are national SDGs points and for village SDGs added one points involving participation institutions, culture and wisdom local.

Village SDGs Number 1: Villages Without Poverty

This goal targeting by 2030 rural poverty reach 0 percent. That is, by 2030, no can there is poor people in the village. For achieve that target, of course many policies that must taken and implemented together, in skeleton achievement village goals without poverty, both by the government center, government area nor government village, like, increase income the poor, guarantee access to service base as well as protect whole Public from all form disaster. In the 2005-2025 RPJPN, the

⁴¹ Fatmawati , et al , *Independent Village Development Through Community Participation In Subdistrict Pattalassang Regency Gowa* , Journal of Public Policy and Management, Volume 1 Number 1 May 2020, pp . 16-17.

⁴² <https://mediaindonesia.com/economy/410027/mendes-asserkan-data-sdgs-desa-penting-definite-pembinaan-desa>

⁴³ Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015, page 2.

⁴⁴ Ibid, Indeks Desa Membangun, page 6

problem poverty seen in framework multidimensional, hence poverty no only related size income, but concerning a number of matters, including: (i) the vulnerability and vulnerability of people or Public for be poor; (ii) concerning yes/no existence fulfillment right base residents and yes/no existence difference treatment somebody or group Public in undergo life by dignified.⁴⁵

For measure poverty, the Central Statistics Agency (BPS) uses draft ability Fulfill needs base (*basic needs approach*). With approach this, poverty seen as inability from side economy for Fulfill needs base food and not food, measured from side expenditure. So, the poor are residents who have an average expenditure per capita per month below the poverty line. As for the amount house poor ladder can seen in the table under this:

Table 3
Household Characteristics By Poverty Status 2020-2021

| Karakteristik Rumah Tangga | Karakteristik Rumah Tangga Menurut Status Kemiskinan | | | | | | | | | | | |
|--|--|------------|---------|------------|------------|---------|---------------------------|------------|---------|------------|------------|---------|
| | Rumah Tangga Miskin | | | | | | Rumah Tangga Tidak Miskin | | | | | |
| | 2020 | | | 2021 | | | 2020 | | 2021 | | | |
| | Semester 1 | Semester 2 | Tahunan | Semester 1 | Semester 2 | Tahunan | Semester 1 | Semester 2 | Tahunan | Semester 1 | Semester 2 | Tahunan |
| Rata-rata jumlah anggota rumah tangga (orang) | 4.66 | 4.83 | - | 4.49 | 4.50 | - | 3.63 | 3.70 | - | 3.51 | 3.47 | - |
| Persentase kepala rumah tangga wanita | 15.88 | 13.37 | - | 13.19 | 12.64 | - | 15.81 | 15.48 | - | 14.48 | 14.98 | - |
| Rata-rata usia kepala rumah tangga (tahun) | 50.75 | 50.91 | - | 50.18 | 50.32 | - | 48.55 | 49.75 | - | 48.35 | 48.90 | - |
| Rata-rata lama sekolah kepala rumah tangga (tahun) | 5.86 | - | - | 6.14 | 6.43 | - | 8.43 | - | - | 8.56 | 8.58 | - |
| Tingkat pendidikan kepala rumah tangga (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Tidak tamat SD | 33.27 | 29.68 | - | 29.86 | 28.41 | - | 18.25 | 18.36 | - | 16.71 | 16.56 | - |
| b. SD | 37.16 | 37.03 | - | 37.74 | 38.10 | - | 28.13 | 28.63 | - | 28.15 | 28.44 | - |
| c. SMP | 13.82 | 14.99 | - | 15.05 | 15.96 | - | 15.21 | 15.45 | - | 16.15 | 17.42 | - |
| d. SMA | 14.31 | 16.61 | - | 15.54 | 14.90 | - | 28.72 | 27.83 | - | 28.70 | 27.69 | - |
| e. PT | 1.44 | 1.70 | - | 1.81 | 2.64 | - | 9.69 | 9.74 | - | 10.29 | 9.89 | - |
| Sumber penghasilan utama rumah tangga (%) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| a. Tidak Bekerja | 15.02 | 14.76 | - | 12.90 | 14.84 | - | 13.20 | 15.54 | - | 12.22 | 12.86 | - |
| b. Pertanian | 46.30 | 45.78 | - | 51.33 | 47.39 | - | 27.33 | 27.73 | - | 31.60 | 30.74 | - |
| c. Industri | 6.58 | 6.55 | - | 6.08 | 6.83 | - | 9.81 | 9.38 | - | 9.13 | 9.23 | - |
| d. Lainnya | 32.10 | 32.91 | - | 29.69 | 30.93 | - | 49.66 | 47.34 | - | 47.05 | 47.18 | - |

Diolah dari Hasil Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), DPS

Source: BPS, 2020

Table 4
Amount and Percentage Poor Population by Region, March 2019–March 2020

| Region/ Year | Amount poor people (million people) | Percentage poor people |
|--------------|-------------------------------------|------------------------|
| Urban | | |
| March 2019 | 9.99 | 6.69 |
| March 2020 | 11.16 | 7.38 |
| Rural | | |
| March 2019 | 15,15 | 12.85 |
| March 2020 | 15.26 | 12.82 |
| Total | | |

⁴⁵ [SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://www.kemendesa.go.id/)

| | | |
|------------------|-------|-------|
| March 2019 | 25,14 | 9.41 |
| March 2020 | 26.42 | 9.78 |
| Town And Village | | 49.21 |
| Village | | 55.68 |
| City | | 45.97 |

Source: BPS, 2020

In order to achieve the target of 0 percent rural poverty by 2030, there are a number of targets that must be reached in the village. Among them, as much as 100 percent Public Village Health Card (PKK) guarantee health; person with poor and women with disabilities head family (PEKKA) 100 percent accept help fulfillment needs base; scope service health, childbirth and immunization, use contraception, access to drinking water and sanitation good 40 percent population income lowest; access and service education; decent housing for population income low; as well as fulfillment needs base other.⁴⁶

Village SDGs Number 2: Villages Without Starving

By 2030, the goal of this target is that there is no hunger in the village, also the village reaches food sovereignty, repairs nutrition and promotes sustainable agriculture. This goal is in line with priority Indonesia's development which is contained in the priority food and nutrition security and creation field work.

The second agenda of the Village SDGs is to end all types of hunger in villages by 2030 and strive for food and nutrition security, to ensure everyone has good food going to a healthy life. Achievement of this goal requires access to food and improvement of agricultural production by sustainable, which includes enhancing productivity and income of farmers, development of technology and market access, systems of sustainable food production, and plus production of agriculture.⁴⁷

Village SDGs Number 3: Healthy and Prosperous Villages

This goal is meant to ensure the life of village inhabitants for the realization of welfare. This goal requires easy access to health services for village inhabitants. 2018 Basic Health Research (Riskesdas) shows that: proportion of knowledge of household access to health services, seen from type of transportation, time, mileage and cost, results are: easy 37.1 percent; difficult 36.9 percent; and very difficult 26 percent. For that reason, it is necessary to reach the village's SDG goals, the

⁴⁶ [Kemiskinan – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](http://kemiskinan-sdgs.desa.kemendesa.go.id)

⁴⁷ [SDGs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](http://sdgs.desa.nomor.2.desa.tanpa.kelaparan-sdgs.desa.kemendesa.go.id)

government village and super village must ensure availability: access inhabitant village to Health services, affordable guarantee health for inhabitant village, decline number Dead mother (AKI), number Dead infants (IMR), increased gift immunization complete in infants, prevalence usage contraception, control HIV/AIDS, tuberculosis, obesity, malaria, leprosy, filariasis (elephantiasis), control abuse drugs, as well as decline number birth at age teenager.⁴⁸

Village SDGs Number 4: Quality Village Education

Development seeks increase income for rural poor, guarantee access inhabitant village to service basic, as well as protect whole inhabitant village from all form disaster. For reach destination enhancement income for rural poor, then the main target from destination this is enhancement quality source power village human resources. Education is form investment that determines the future nation. Education becomes condition enhancement quality and power competitive source power village human resources. because of that, the government village together with super village must ensure availability and affordability service quality education for inhabitant village, as well easy access for inhabitant village to service education.

because of that, for reach the goal of SDGs for Quality Village Education Villages, then what must be done is carried out by the government village with Support from the super village are: access inhabitant village to service education accredited; access inhabitant village to institution education boarding school; as well as ensure availability service quality and affordable education for inhabitant village. In addition, the goal this focus on availability service education Skills for inhabitant village, service education pre schools, non-formal education, and availability garden reading or library village.⁴⁹

Village SDGs Number 5: Involvement of Village Women

With destination this, government village with Support from various party be at the forefront in gender mainstreaming. By 2030, the Village SDGs Goals are creation conditions that place all in habitant village in fair position, without discrimination to woman in all aspect life. Apart from giving fair treatment, open same opportunity in affairs public for woman village. Achieved The SDGs goals of this village also require deletion all form violence to women and children.

A number of indicator achievement SDGs goals for this village are: availability space and opportunity for involvement woman in government village, fine as apparatus village nor in the Village Representative Body (BPD); median age Marry

⁴⁸ [SDGs Desa Nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

⁴⁹ [SDGs Desa Nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

first women; service health for women, and service education for women; as well as involvement woman in planning and implementation development village.⁵⁰

Village SDGs Number 6: Villages with Clean Water and Sanitation

Clean water and sanitation worthy is needs base human. Fulfillment of clean water and proper sanitation still become a problem all over the world. Therefore, fulfillment on the need for clean water, drinking water and sanitation Becomes destination development sustainable.

Achieved SDGs goals for this village could be measured from a number of things, such as: access house ladder on drinking water and sanitation worthy reach 100 percent by 2030; happening efficiency use of drinking water; as well as existence action protect and restore ecosystem related source water power, including mountains, forest, land wetlands, rivers, groundwater, and lakes.⁵¹

Village SDGs Number 7: Energy Village Clean and Renewable

Energy is mover economy and prerequisites in development. Availability sufficient and affordable energy could support fulfillment needs base like food, service health, quality education, which supports development man quality. Preparation access more energy large in areas and villages remote, where access energy is very limited, has contribute to improvement income Public by real (Mursanti and Tumiwa, 2019)

Ratio electrification is indicators used government for measure range provision energy in Indonesia, which is defined as amount connected house with electricity without see quality provision received electricity. Until 2019, no all villages in Indonesia are flowing electricity. Ministry of Village data. PDT and Transmigration show that, at up to In 2019, there were 1,667 villages in Indonesia covering 258,252 families same very no have facility electricity.

Electric strategy taken village is to do expansion network distribution already exist and build generator energy renewable as well as generator hybrid for very remote villages as well as use generator made from burn oil /BBM (PLN, 2017). Electrical program villages in 2019 targeting 1,746 villages, because of that, for Fulfill needs population to energy, as well as for reduce house gas emissions glass, as global commitment, government push for increase role energy new and updated by keep going continuously as part effort guard resilience and independence energy. According to PP No. 79 of 2014 concerning Policy National Energy, mix target energy new and renewable by 2025 at least 23% and 31% in 2050.

Goals of the Village SDGs ensure everyone has access to energy renewable. Achievements destination this until year 2030 can be measured with a number of

⁵⁰ [SDGs Desa Nomor 5: Keterlibatan Perempuan Desa – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

⁵¹ [SDGs Desa Nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi – SDGs Desa \(kemendesa.go.id\)](https://kemendesa.go.id)

indicators, including: consumption electricity house the stairs in the Village reach a minimum of 1,200 kwh; Households in the village use gas or rubbish wood for cooking; use mix energy renewable in the village.⁵²

Village SDGs Number 8: Equitable Village Economic Growth

Face The Covid-19 pandemic, the Indonesian economy and even the world are facing very tough challenge. In the second quarter of 2020, BPS (2020) released happening contraction Indonesia 's economy is 5.32. As a result, the poor population in Indonesia in March 2020 reached 26.42 million people, or 9.78 percent. Amount this experience an increase of 1.28 million people, or an increase of 0.37 percent from from March 2019. In rural areas, the number of poor people fell by 0.03 percent, while in urban areas it rose 0.69 percent.

Similar thing occur with Exchange Rate Farmers (NTPT) who experience drop from 99.94 in month July 2020 to 98.64 in August 2020, or down of 1.31. Previously, Indonesia's Open Unemployment Rate (TPT) in February 2020 reached 4.99 percent, down 0.02 percent. points compared to February 2019 TPT.

Growth the accompanying economy even distribution results development be the main target SDGs goals of this village, including: with method create field decent work, and open opportunity economy new for all inhabitant village. Indicator success destination this covers absorbed force work in field work; implementation congested creation cash capable village absorb 50 percent force work village; the place work that provides a sense of security and is equipped with facility service health.⁵³

Village SDGs Number 9: Village Infrastructure and Innovation in accordance Needs

Physical capital and resources power man play a role important in growth economy. The availability of physical capital is closely related with availability of investment funds (Maryaningsih, et al: 2014). A study from the World Bank (1994) stated that: GDP elasticity (Product Gross Domestic Product) to infrastructure in a country is between 0.07 to with 0.44. This thing means with increase of 1 (one) percent just availability infrastructure will cause GDP growth of 7% to with 44%, this enough numbers significant.

because of that, for reach growth positive economy, then reliability infrastructure village is very decisive. Starting from infrastructure Street village, road axis village, as well as infrastructure others, who support activity economy inhabitant village, like infrastructure field agriculture, fisheries, and sectors other.

⁵² [SDGs Desa Nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

⁵³ [SDGs Desa Nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

In addition to infrastructure, the Village SDGs also suppress its birth innovation in the village in all fields, such as economy, service public, as well as products superior village. Because of that, the Village SDGs use a number of indicators of success that can be carried out by the government village and supra village, including: conditions reliable road; wharf / mooring boat; growth industry in the village; as well as contribution industry to growth economy village⁵⁴

Village SDGs Number 10: Villages Without Gap

Issue gap always joins activity development. Gap income and wealth has become a global issue and tends to increase in some decades lately, even in developing countries gap increase up to 11%. Currently 1% of the population the richest in the world own up to 40% of global assets, while 10% of the world's poor only earn 2% to 7% (Oxfam, 2020).

Planning centralized development, no longer considers conditions spatial, more a big possibility for a worse gap, good gap between areas nor gap between people. Gap is an indicator that results in development economy something area or country, not enjoyed evenly by various groups of welfare. Because of that, efforts to reduce inequality become an important effort in resolving poverty.

Village SDGs aim to reduce and eliminate gap by 2030. For that success achievements destination this can be measured with village Gini coefficient; level poverty in the village; development status village; as well as index freedom civilian in the village.⁵⁵

Village SDGs Number 11: Safe and Comfortable Village Residential Areas

Settlement needs basic human must be fulfilled, so that humans could operate functions social and economic in the middle society. Fulfillment of rights on settlement requires decent, clean, safe, and sustainable housing. Percentage of people who live in urban areas is more compared to rural areas.

Needs for settlement worthy to inhabit with price affordable often not balanced with availability of settlements that meet the standard of facilities necessary infrastructure, such as open green spaces, sports fields, business and trade places, public services, sanitation, clean water, and waste management.

This goal, until 2030, targets realization inclusive, safe, strong and sustainable villages, with some achievement targets such as a clean and healthy surface, the

⁵⁴ [SDGs Desa Nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

⁵⁵ [SDGs Desa Nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

creation of security environment through self-subsistent community, as well as awakening participation all party in development village.⁵⁶

Village SDGs Number 12: Environmentally Aware Village Consumption and Production

This goal related with effort reduce impact environment caused to earth through pattern proper production and consumption. Growth economy is indicator important in realize well-being citizens. However thus, growth created economy must consider sustainability. because of that, needed step subtraction footsteps ecology with change method produce and consume food and resources power other. Separation growth economy from use source power and degradation environment is one village SDGs goals.

Efficiency in management source power natural owned by together, and effort reduce rubbish toxic and pollutant is an important target for reach destination this. One of them with push citizens, the business world, as well as consumer for recycle repeat and reduce trash. For that's what it takes shift activity more production and consumption sustainable.

Required policy a village that is conducive and has perspective preservation environment. One of them determined with handling waste and trash in accordance needs. Handling rubbish by Correct support creation pattern sustainable production and consumption. Handling trash in the city more registered compared to rural areas. In urban areas also built The place Disposal Garbage (TPS). However Thing the no occurs in rural areas. Table 5.9 shows percentage house stairs in the city based on method handling most trash carried out (BPS, 2017).

Indicator The success of this Village SDGs includes: could seen from policy village that governs about management business world waste; happening efficiency use source power nature; as well as effort management rubbish house ladder nor to the business world.⁵⁷

Village SDGs Number 13: Responsive Villages Climate Change

Impact change climate has feel by almost all countries in the world and has been give consequence bad at life. According to UNDP (2019) data, greenhouse gas emissions glass moment this more than 50% more tall compared 1990. Losses annual average economy consequence disaster related climate reach hundreds billion dollars. Not yet impact disaster geophysical to humans who are 91% related

⁵⁶ [SDGs Desa Nomor 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

⁵⁷ [SDGs Desa Nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

with climate, between 1998 and 2017 have been killed 1.3 million people and left 4.4 billion injured.

SDGs of this village aim for help subtraction impact change global climate, with some programs that can carried out by the government village in accordance with Duty principal and function. Success achievements destination this could seen from a number of indicators, one of them with index risk disaster in the village.⁵⁸

Village SDGs Number 14: Village Cares Marine Environment

More than 3 billion people depend eye livelihoods on the sea and diversity biological beaches and resources power sea has donate about \$28 trillion for global economy every year (UN, 2019). In addition, the ocean also absorbs 30 percent carbon dioxide produced human. But what happened moment this is damage waters continuous coast continuously because pollution with an average of 13,000 pieces rubbish plastic/km² ocean, acidification sea, and 30 percent the world's fish stocks are experiencing exploitation excess, well below the level at which they were can produce sustainable results (Bappenas, 2019)

Goals of the Village SDGs is for protect beach and ocean. For measure success achievements destination this, used a number of indicator following: policy village related protection resource sea; happening enhancement fishing reasonable; as well as no happening *illegal fishing*.⁵⁹

Village SDGs Number 15: Village Cares Land Environment

Needs to food Keep going experience enhancement globally. By 2050, it is estimated that as many as 9 billion people will fill in combined earth with degradation environment and urgency land. Therefore need conducted effort make land permanent safe and productive, especially on land (UN, 2018). However, in 2018 land critical areas throughout Indonesia amounted to 9,453,729 ha, while very critical land reached 4,552,721 ha (BPS, 2020).

sake of fulfillment needs man moment this and the future come, and to protect wildlife, then this village 's SDGs aim for protect source power nature and wildlife. For see success achievements destination this, used indicator among them policy government village related effort preservation diversity life; large land open green; as well as amount animal threatened extinct.⁶⁰

Village SDGs Number 16: Peaceful Village with Justice

⁵⁸ [SDGs Desa Nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

⁵⁹ [SDGs Desa Nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

⁶⁰ [SDGs Desa Nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

SDGs Village is one of them aim for realize condition safe village, so could ensure government village could work by fair and effective. because of that, some effort must conducted the village government and the village supra are reduce all form violence by significant, and find solution period long face conflict inhabitant village. all this time incident crime in the village still enough high.

Goals of the Village SDGs set some targets to be achieved by 2030: no existence incident crime, fighting, violence in house stairs (domestic violence), as well as violence to child; sustainability the culture of gotong royong in the village; improve it index democracy in the village; as well as no existence trading people and workers child.⁶¹

Village SDGs Number 17: Partnership for Village Development

Partnership for reach destination development village this is basically is means implementation and revitalization partnership village for realize whole destination development sustainable. Because, development village no will succeed maximum without involvement related parties. Starting from figure community, youth mover village, girl mover economy village, college high, the business world, supra village, of course also the apparatus village and the Village Consultative Body (BPD).

The Village SDGs require existence partnership good village with various This includes partnerships with village else, or with village. Because only with partnership/work same that's development sustainable could materialized. because of that, village must could reduce ego in order to realize the 2030 Village SDGs.

For measure achievement destination this, used a number of indicator achievements, including: existence and form work same village with party third; availability internet network in the village; statistics village as well as commodities and activities export by village.

Village SDGs Number 18: Dynamic Village Institutions and Adaptive Village Culture

Institutional village is a very vital component for push continuity development. Because of that, existence Village institutions must strengthened so that could support achievement destination development sustainable.

SDGs Villages are trying for maintain wisdom local, as well as to do revitalizing and moving whole element institutions at the village. Because, involvement all element village, strong and functioning institutions in the village in life community, will Becomes crutch life diversity in a dynamic village, as well as booster achieving the Village SDGs.

⁶¹ [SDGs Desa Nomor 16: Desa Damai Berkeadilan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

In 2018 participation population in activity social community in the environment around already enough big, that is by 85.43 percent (BPS, 2018). If categorized as based on the place stay, resident rural more many follow _ activity social society compared population urban areas (88.56 percent compared to 82.94 percent). As for three activity social the most social followed population 10 years old to on in three month last, that is activity death (63.87 percent), religious (61.87 percent) and social others (46.82 percent).

For reach SDGs Village 2030 goals, are used a number of indicators include: sustainability activity help help and mutual cooperation; participation religious figures in activity development village; protection inhabitant village to people weak and child orphan; preservation culture village; as well as solution problem inhabitant based on approach culture.⁶²

By national score achievement of SDGs on Sunday first August 2022, as for village that has input not yet maximum, can seen in the picture under this

Figure 3
National SDGs Score

45.86

Skor SDGs Desa Secara Nasional !



Source : Village [Information System \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

Readable that in move the economy in the village, village have a business entity owned by village. As for institutional could seen in the image below this

Figure 4

⁶² [SDGs Desa Nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

Distribution of Village Owned Enterprises



Source : Village [Information System \(kemendesa.go.id\)](http://kemendesa.go.id)

Can be seen in the ratings index village building that was launched by the ministry village, area left behind and transmigrated.

Figure 5
IDM status every Province

| Ranking | Provinsi | Status IDM | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 | 2022 | 2021 |
|---------|---------------------------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|----------------------------------|--------|--------|
| 1 | BALI | MANDIRI dari 636 desa | 0.8269 | 0.8037 | MAJU dari 636 desa | 0.8269 | 0.8037 | MAJU dari 636 desa | 0.8269 | +2.81% |
| 2 | DI YOGYAKARTA | MAJU dari 392 desa | 0.8128 | 0.7837 | MAJU dari 392 desa | 0.8128 | 0.7837 | MAJU dari 392 desa | 0.8128 | +3.58% |
| 3 | JAWA BARAT | MAJU dari 5312 desa | 0.7529 | 0.7203 | MAJU dari 5312 desa | 0.7529 | 0.7203 | MAJU dari 5312 desa | 0.7529 | +4.33% |
| 4 | JAWA TIMUR | MAJU dari 7724 desa | 0.7517 | 0.7216 | MAJU dari 7724 desa | 0.7517 | 0.7216 | MAJU dari 7724 desa | 0.7517 | +4.00% |
| 5 | SUMATERA BARAT | MAJU dari 928 desa | 0.7402 | 0.7180 | MAJU dari 928 desa | 0.7402 | 0.7180 | MAJU dari 928 desa | 0.7402 | +3.00% |
| 6 | KALIMANTAN BARAT | MAJU dari 2031 desa | 0.7382 | 0.6978 | BERKEMBANG dari 2031 desa | 0.7382 | 0.6978 | BERKEMBANG dari 2031 desa | 0.7382 | +5.47% |
| 7 | KEPULAUAN BANGKA BELITUNG | MAJU dari 309 desa | 0.7362 | 0.7035 | BERKEMBANG dari 309 desa | 0.7362 | 0.7035 | BERKEMBANG dari 309 desa | 0.7362 | +4.44% |
| 8 | KALIMANTAN TIMUR | MAJU dari 841 desa | 0.7344 | 0.7071 | BERKEMBANG dari 841 desa | 0.7344 | 0.7071 | BERKEMBANG dari 841 desa | 0.7344 | +3.72% |
| 9 | NUSA TENGGARA BARAT | MAJU dari 1005 desa | 0.7339 | 0.7005 | BERKEMBANG dari 1005 desa | 0.7339 | 0.7005 | BERKEMBANG dari 1005 desa | 0.7339 | +4.55% |
| 10 | SULAWESI UTARA | MAJU dari 1507 desa | 0.7194 | 0.6923 | BERKEMBANG dari 1507 desa | 0.7194 | 0.6923 | BERKEMBANG dari 1507 desa | 0.7194 | +3.77% |
| 11 | JAWA TENGAH | MAJU dari 7809 desa | 0.7118 | 0.6930 | BERKEMBANG dari 7809 desa | 0.7118 | 0.6930 | BERKEMBANG dari 7809 desa | 0.7118 | +2.64% |
| 12 | KALIMANTAN SELATAN | MAJU dari 1864 desa | 0.7105 | 0.6741 | BERKEMBANG dari 1864 desa | 0.7105 | 0.6741 | BERKEMBANG dari 1864 desa | 0.7105 | +5.11% |
| 13 | JAMBI | MAJU dari 1399 desa | 0.7089 | 0.6887 | BERKEMBANG dari 1399 desa | 0.7089 | 0.6887 | BERKEMBANG dari 1399 desa | 0.7089 | +2.85% |
| 14 | GORONTALO | BERKEMBANG dari 657 desa | 0.7068 | 0.6736 | BERKEMBANG dari 657 desa | 0.7068 | 0.6736 | BERKEMBANG dari 657 desa | 0.7068 | +4.70% |
| 15 | SULAWESI SELATAN | BERKEMBANG dari 2255 desa | 0.7019 | 0.6694 | BERKEMBANG dari 2255 desa | 0.7019 | 0.6694 | BERKEMBANG dari 2255 desa | 0.7019 | +4.63% |
| 16 | LAMPUNG | BERKEMBANG dari 2435 desa | 0.7018 | 0.6809 | BERKEMBANG dari 2435 desa | 0.7018 | 0.6809 | BERKEMBANG dari 2435 desa | 0.7018 | +3.04% |
| 17 | RIAU | BERKEMBANG dari 1591 desa | 0.7012 | 0.6746 | BERKEMBANG dari 1591 desa | 0.7012 | 0.6746 | BERKEMBANG dari 1591 desa | 0.7012 | +3.79% |
| 18 | KEPULAUAN RIAU | BERKEMBANG dari 275 desa | 0.6914 | 0.6681 | BERKEMBANG dari 275 desa | 0.6914 | 0.6681 | BERKEMBANG dari 275 desa | 0.6914 | +3.37% |
| 19 | KALIMANTAN TENGAH | BERKEMBANG dari 1433 desa | 0.6782 | 0.6517 | BERKEMBANG dari 1433 desa | 0.6782 | 0.6517 | BERKEMBANG dari 1433 desa | 0.6782 | +3.91% |
| 20 | BENGGULU | BERKEMBANG dari 1341 desa | 0.6749 | 0.6559 | BERKEMBANG dari 1341 desa | 0.6749 | 0.6559 | BERKEMBANG dari 1341 desa | 0.6749 | +2.82% |
| 21 | SULAWESI TENGAH | BERKEMBANG dari 1842 desa | 0.6706 | 0.6484 | BERKEMBANG dari 1842 desa | 0.6706 | 0.6484 | BERKEMBANG dari 1842 desa | 0.6706 | +3.31% |
| 22 | SUMATERA SELATAN | BERKEMBANG dari 2853 desa | 0.6680 | 0.6500 | BERKEMBANG dari 2853 desa | 0.6680 | 0.6500 | BERKEMBANG dari 2853 desa | 0.6680 | +2.69% |
| 23 | BANTEN | BERKEMBANG dari 1238 desa | 0.6626 | 0.6445 | BERKEMBANG dari 1238 desa | 0.6626 | 0.6445 | BERKEMBANG dari 1238 desa | 0.6626 | +2.73% |
| 24 | MALUKU | BERKEMBANG dari 1198 desa | 0.6526 | 0.6290 | BERKEMBANG dari 1198 desa | 0.6526 | 0.6290 | BERKEMBANG dari 1198 desa | 0.6526 | +3.62% |
| 25 | KALIMANTAN UTARA | BERKEMBANG dari 447 desa | 0.6521 | 0.6292 | BERKEMBANG dari 447 desa | 0.6521 | 0.6292 | BERKEMBANG dari 447 desa | 0.6521 | +3.51% |
| 26 | ACEH | BERKEMBANG dari 6497 desa | 0.6482 | 0.6201 | BERKEMBANG dari 6497 desa | 0.6482 | 0.6201 | BERKEMBANG dari 6497 desa | 0.6482 | +4.34% |
| 27 | SULAWESI TENGGARA | BERKEMBANG dari 1908 desa | 0.6465 | 0.6231 | BERKEMBANG dari 1908 desa | 0.6465 | 0.6231 | BERKEMBANG dari 1908 desa | 0.6465 | +3.62% |
| 28 | SULAWESI BARAT | BERKEMBANG dari 575 desa | 0.6309 | 0.6043 | BERKEMBANG dari 575 desa | 0.6309 | 0.6043 | BERKEMBANG dari 575 desa | 0.6309 | +4.22% |
| 29 | SUMATERA UTARA | BERKEMBANG dari 5417 desa | 0.6155 | 0.6004 | BERKEMBANG dari 5417 desa | 0.6155 | 0.6004 | BERKEMBANG dari 5417 desa | 0.6155 | +2.45% |
| 30 | NUSA TENGGARA TIMUR | BERKEMBANG dari 3026 desa | 0.6104 | 0.5885 | TERTINGGAL dari 3026 desa | 0.6104 | 0.5885 | TERTINGGAL dari 3026 desa | 0.6104 | +3.59% |
| 31 | MALUKU UTARA | TERTINGGAL dari 1063 desa | 0.5924 | 0.5861 | TERTINGGAL dari 1063 desa | 0.5924 | 0.5861 | TERTINGGAL dari 1063 desa | 0.5924 | +1.06% |
| 32 | PAPUA BARAT | TERTINGGAL dari 1742 desa | 0.5184 | 0.5058 | TERTINGGAL dari 1742 desa | 0.5184 | 0.5058 | TERTINGGAL dari 1742 desa | 0.5184 | +2.43% |
| 33 | PAPUA | SANGAT TERTINGGAL dari 5411 desa | 0.4786 | 0.4680 | SANGAT TERTINGGAL dari 5411 desa | 0.4786 | 0.4680 | SANGAT TERTINGGAL dari 5411 desa | 0.4786 | +2.21% |

Source : Village [Information System \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

IV Conclusion

Development in the village based on the achievement of the SDGs, this in line with achievement of the SDGs national. Realize village without poverty, without hunger, proper clean water and sanitation, energy clean and renewable, infrastructure and innovation in accordance with needs, citizens village healthy and prosperous, accept education quality, girl participate, grow economy evenly distributed, consumption and production aware environment, stay environment safe and comfortable, responsive change climate, and destination typical village SDGs is institutional village dynamic and cultural village adaptive.

Reference

legislation

Law Number 6 of 2014 concerning Villages

Rules President of Indonesia No. 59/2017 concerning SDGs implementation in Indonesia.

Regulation of the Minister of Villages, PDT, and Transmigration Number 7 of 2021 concerning priority use of village funds 2022 is mentioned that the village SDGs.

Book and Journal

Fatmawati , et al , *Independent Village Development Through Community Participation In Subdistrict Pattallassang Regency Gowa* , Journal of Public Policy and Management, Volume 1 Number 1 May 2020.

HAW Widjaja, *Otonomi Desa: Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada , 2008).

Indeks Desa Membangun, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, 2015.

Rina Susanti, *Peran Masyarakat dalam Pencapaian Target Sustainable Development Goals Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi*, Journal of Education, Humanities and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 3, No. 3, April 2021: 1253-1263, DOI: 10.34007.

Tundjung Linggarjati, Implementasi SDGs di Desa Pandak, Kecamatan Batu Raden Kabupaten Banyumas, Prosiding Seminar Nasional dan Call for Papers "Pengembangan Sumber Daya Perdesaan dan Kearifan Lokal Berkelanjutan XI" 12-14 October 2021 Purwokerto ISBN 978-602-1643-67-9.

Website

[https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkahkonkret-bangun-bangsa\)](https://kemendes.go.id/berita/view/detil/3415/mendes-pdtt-jadikan-sdgs-desa-sebagai-langkahkonkret-bangun-bangsa)

<https://mediaindonesia.com/economy/410027/mendes-asserkan-data-sdgs-desa-penting-definite-pembinaan-desa>

[Kemiskinan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

SDGs at a [Glance | \(bappenas.go.id\)](https://bappenas.go.id), accessed on March 2, 2022

[SDGs Desa Nomor 1: Desa Tanpa Kemiskinan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 10: Desa Tanpa Kesenjangan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 11: Kawasan Pemukiman Desa Aman dan Nyaman – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 12: Konsumsi dan Produksi Desa Sadar Lingkungan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 13: Desa Tanggap Perubahan Iklim – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 14: Desa Peduli Lingkungan Laut – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 15: Desa Peduli Lingkungan Darat – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 16: Desa Damai Berkeadilan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 18: Kelembagaan Desa Dinamis dan Budaya Desa Adaptif – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 2: Desa Tanpa Kelaparan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 3: Desa Sehat dan Sejahtera – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 4: Pendidikan Desa Berkualitas – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](https://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 5: Keterlibatan Perempuan Desa – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 6: Desa Layak Air Bersih dan Sanitasi – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 7: Desa Berenergi Bersih dan Terbarukan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 8: Pertumbuhan Ekonomi Desa Merata – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)

[SDGs Desa Nomor 9: Infrastruktur dan Inovasi Desa sesuai Kebutuhan – SDGs Desa \(kemendes.go.id\)](http://kemendes.go.id)